

**Analisis Kesetaraan Gender dalam Rangka Mencapai
Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar Kedua di Indonesia**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Alyssia Putri Manurung
NPM : 2105180006
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2025



UMSU

Reputasi | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Alyssia Putri Manurung
N.P.M : 2105180006
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Analisis Kesetaraan Gender dalam Rangka Mencapai Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar Kedua di Indonesia

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas akhir	Paraf	Keterangan
7/02/2025	Bab 4: Memperbaiki perkembangan pembangunan ekonomi inklusif pilar kedua		
10/02/2025	Bab 4: Memperbaiki data persentase kemiskinan		
12/02/2025	Bab 4: Menambahkan "LOB" pada data, agar menjadi signifikan di pengolahan data		
14/02/2025	Bab 4: Menganalisis rumusan ketiga yaitu analisis tipologi kawasan tentang kesetaraan gender per provinsi		
17/02/2025	Bab 5: Membuat Kesimpulan dan Saran		
17/03/2025	ACC U/ di Sidangkan !!		

Medan, 17 Maret 2025

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Smart | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh:

Nama Lengkap : ALYSSIA PUTRI MANURUNG
N.P.M : 2105180006
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. TIRTA DELI GG. MELUR
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RANGKA
MENCAPAI PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF PILAR
KEDUA DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, 18 Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. H. JANURI, SE., M.M., M.Si., CMA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 April 2025, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : ALYSSIA PUTRI MANURUNG
N P M : 2105180006
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RANGKA MENCAPAI PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF PILAR KEDUA DI INDONESIA

DINYATAKAN : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Roswita Hafni, M.Si.)

Penguji II

(Hastina Febriaty, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alyssia Putri Manurung

N.P.M : 2105180006

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Tugas Akhir : Analisis Kesetaraan Gender dalam Rangka Mencapai Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar Kedua di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul **“Analisis Kesetaraan Gender dalam Rangka Mencapai Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar Kedua di Indonesia”** bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya



Menyatakan

Alyssia

Alyssia Putri Manurung

ABSTRAK

ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RANGKA MENCAPAI PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF PILAR KEDUA DI INDONESIA

Alyssia Putri Manurung
Program Studi Ekonomi Pembangunan
alyssiaputri19@gmail.com

Indonesia mengintegrasikan konsep ekonomi inklusif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dapat diartikan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif itu sendiri adalah mengurangi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah melihat perkembangan ketimpangan pendapatan, sumbangan pendapatan perempuan, persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari. Menganalisis variabel bebas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Pegawai Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender, dan Melakukan analisa tipologi kelas tentang Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di provinsi Indonesia. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi inklusif meningkat namun peningkatannya tidak cukup signifikan, pada hasil olahan data model ekonometrika variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh signifikan terhadap Kesetaraan Gender. Dalam melakukan pemetaan Tipologi Kelas menggunakan *software IBM SPSS Statistics 26*. Tipologi Kelas dilakukan berdasarkan data Indeks Kesetaraan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional per Provinsi.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Inklusif, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

ANALYSIS OF GENDER EQUALITY IN ORDER TO ACHIEVE SECOND PILLAR INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

Alyssia Putri Manurung
Program Studi Ekonomi Pembangunan
alyssiaputri19@gmail.com

Indonesia has integrated the concept of inclusive economy into the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. It can be interpreted that one of the objectives of inclusive economic development itself is to reduce gender inequality between men and women. The purpose of this study is to look at the development of income inequality, women's income contribution, percentage of poor people and average protein consumption per capita per day. Analyse the independent variables of Female Labour Force Participation Rate, Wages of Female Workers/Employees, Female Formal Employment, Female Literacy Rate, Female Completion of Higher Education, Maternal Mortality Rate, and Female Involvement in Parliament on Gender Equality, and conduct a Klassen typology analysis of the Gender Inequality Index (GII) in Indonesian provinces. The type of data used in this research is secondary data. The results of this study indicate that the development of inclusive economic development is increasing but the increase is not significant enough, in the results of the econometric model data processing variables of Female Labour Force Participation Rate, Wages of Female Workers/Employees, Female Formal Labour, Female Literacy Rate, Female Graduation in Higher Education, Maternal Mortality Rate, and Women's Involvement in Parliament have a significant effect on Gender Equality. The Klassen Typology mapping was conducted using IBM SPSS Statistics 26 software. The Klassen Typology was conducted based on data from the Gender Equality Index and Women as Professionals per Province.

Keywords: *Inclusive Economic Development, Gender Equality*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Kesetaraan Gender dalam Rangka Mencapai Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar Kedua di Indonesia**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki, dan ilmu kepada saya dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih untuk yang tercinta Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan doa, rasa cinta, kasih sayang, dan dukungan yang luar biasa serta mendidik dan mendukung saya.
3. Terimakasih untuk Alyssia Putri Manurung, telah mampu berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan tugas ini sampai akhir nanti.
4. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

10. Bapak dan Ibu Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
11. Bapak dan Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam hal akademik
12. Kepada keluarga tercinta saya yang selalu memberi semangat bahagia kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teruntuk sahabat sekaligus teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini kepada Septia Mayang Saputri, Sally Cicilia Regina Purba, Tiara Mahbengi, Hikmah Saro Harahap, Muhammad Rinaldy Lubis, Nigo Futua, dan Meliana
14. Teruntuk semua teman-teman sekelas yang menempuh di bangku perkuliahan yang sama

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini.

Terimakasih,

Wassamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2025

Penulis

Alyssia Putri Manurung

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	28
1.3. Batasan Masalah.....	29
1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	29
1.4.1 Rumusan Masalah	29
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	29
1.5. Manfaat Penelitian	30
1.5.1 Manfaat Akademik.....	30
1.5.2 Manfaat Non-akademik.....	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
2.1. Uraian Teoritis.....	31
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	31
2.1.2 Produk Domestik Bruto Coklat.....	38
2.1.3 Pembangunan Ekonomi Inklusif	41
2.1.4 Gender	44
2.1.5 Tenaga Kerja.....	46
2.1.6 Pendidikan.....	51
2.1.7 Kesehatan	51
2.1.8 Keterlibatan Perempuan di Parlemen	52
2.1.9 Tipologi Klassen	53
2.2. Regulasi	54
2.3. Penelitian Terdahulu.....	55
2.4. Kerangka Penelitian.....	60
2.4.1 Tahapan Penelitian	60
2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian	60
2.4.3 Kerangka Konseptual Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender	61
2.5 Hipotesis	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1. Pendekatan Penelitian.....	62
3.2. Definisi Operasional	62

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	63
3.3.1 Tempat Penelitian.....	63
3.3.2 Waktu Peneletian.....	63
3.4. Jenis dan Sumber Data	63
3.4.1 Jenis Data	63
3.4.2 Sumber Data	64
3.5. Teknik Pengumpulan Data	64
3.6. Model Estimasi	64
3.7. Metode Estimasi	65
3.8 Teknik Analisis Data	66
3.8.1 Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Gender, Persentase Penduduk Miskin, dan Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Hari	66
3.8.2 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender	66
3.8.3 Analisa Indeks Kesetaraan Gender (IKG) berdasarkan Provinsi di Indonesia Menggunakan Tipologi Klassen.....	73
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 74
4.1 Gambaran Umum Indonesia	74
4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia.....	74
4.1.2 Kondisi Demografi Indonesia.....	75
4.1.3 Perkembangan Ekonomi di Indonesia	78
4.1.4 Perkembangan Sosial di Indonesia	8
4.2 Perkembangan Indikator Pilar Kedua Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	95
4.2.1 Analisis Ekonomi tentang Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia...95	
4.2.2 Analisis Ekonomi tentang Sumbangan Pendapatan Perempuan di Indonesia.....	99
4.2.3 Analisis Ekonomi tentang Persentase dan <i>Share</i> Penduduk Miskin di Indonesia.....	101
4.2.4 Analisis Ekonomi tentang Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari	105
4.3 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender.....	107
4.3.1 Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender.....	107
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	110
4.4 Analisis Tipologi Klassen Indeks Kesetaraan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional berdasarkan Provinsi di Indonesia.....	126
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran.....	133
 DAFTAR PUSTAKA	 134
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 10 Negara Teratas dengan Gini Rasio (&) Tertinggi	20
Tabel 1.2 10 Negara Teratas dengan Gini Rasio (&) Terendah	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Ekonometrika.....	62
Tabel 3.2 Tipologi Klassen Klasifikasi Daerah.....	73
Tabel 4.1 Ketenagakerjaan Indonesia.....	77
Tabel 4.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 & <i>Share</i> di Indonesia.....	83
Tabel 4.3 Gini Rasio Provinsi di Indonesia.....	96
Tabel 4.4 Persentase dan <i>Share</i> Penduduk Miskin di Indonesia	101
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Model	107
Tabel 4.6 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda.....	110
Tabel 4.7 Hasil Regresi Setelah Menambahkan Logaritma Natural	111
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi	112
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	118
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)	121
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	123
Tabel 4.12 Perbaikan Uji Multikolinearitas.....	124
Tabel 4.13 Uji Heterokedastisitas	124
Tabel 4.14 Uji Autokorelasi	125
Tabel 4.15 Perbaikan Uji Autokorelasi	125
Tabel 4.16 Tipologi Klassen Berdasarkan Indeks Kesetaraan Gender dengan Perempuan sebagai Tenaga Profesional per Provinsi Tahun 2023....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Evolusi Indeks Kesetaraan Gender Global 10 Besar Tahun.....	10
Gambar 1.2 Kesetaraan Gender berdasarkan Regional Tahun 2006-2024	13
Gambar 1.3 Gini Rasio Indonesia Tahun 2019-2023	22
Gambar 1.4 Profil Kesetaraan Gender Global Indonesia Tahun 2024.....	24
Gambar 1.5 Jumlah Penduduk di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan 2018 – 2023	27
Gambar 2.1 Pilar dan Sub-pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif	43
Gambar 2.2 Upah Tenaga Kerja.....	49
Gambar 2.3 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah.....	54
Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian.....	60
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Analisa Faktor	61
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia (2019-2024)	75
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024).....	79
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)	80
Gambar 4.4 Tingkat Inflasi di Indonesia (2018-2024).....	81
Gambar 4.5 Gini Rasio Indonesia (2019-2024)	88
Gambar 4.6 Indeks Pembangunan Manusia (2019-2024)	90
Gambar 4.7 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (2019-2024)	92
Gambar 4.8 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024).....	93
Gambar 4.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia (2019-2024)	94
Gambar 4.10 Sumbangan Pendapatan Perempuan Indonesia (2018-2023)	100
Gambar 4.11 Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari (2019-2024)	106
Gambar 4.12 Tipologi Klassen Indeks Kesetaraan Gender dengan Perempuan sebagai Tenaga Profesional	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, manusia berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Todaro, 2011).

Menurut Gunnar Myrdal (peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1974), keberhasilan atau kegagalan dari upaya pembangunan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh sektor pertanian. Secara konvensional, fungsi pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dianggap sebagai sesuatu yang pasif dan sebagai faktor pendukung. Merujuk pada pengalaman historis negara-negara Barat, apa yang dikenal dengan pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktur ekonomi yang cepat, yaitu dari ekonomi yang berfokus pada kegiatan pertanian menuju industri modern dan suatu masyarakat yang lebih kompleks.

Namun demikian, para ahli ekonomi pembangunan mulai menyadari bahwa daerah pedesaan secara umum dan sektor pertanian secara khusus tidaklah pasif, melainkan lebih dari sekedar pilar dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih luas. Keduanya perlu diakui sebagai elemen atau unsur utama yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat esensial dalam strategi pembangunan.

Oleh sebab itu, pengembangan sektor pertanian dan kawasan pedesaan sekarang dianggap oleh banyak kalangan sebagai inti dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif (*integrated rural development*), pertumbuhan industri tidak akan berlangsung dengan baik, dan meskipun hal itu terjadi, akan mengakibatkan ketidakseimbangan internal yang serius dalam perekonomian, yang pada akhirnya akan memperburuk masalah kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan pengangguran.

Transisi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri adalah fenomena global yang berlangsung di negara-negara berkembang. Namun, sektor industri sering kali mengabaikan konsekuensi dari kerusakan lingkungan, yang juga dikenal sebagai 'PDB coklat'. PDB coklat adalah ukuran nilai ekonomi yang tidak mempertimbangkan isu lingkungan atau penipisan sumber daya alam. PDB ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi tidak memperhatikan batasan lingkungan. PDB coklat mencerminkan pembangunan ekonomi yang sangat tergantung pada bahan bakar fosil (*World Bank 2013*).

Jenis ekonomi ini ditandai oleh korupsi politik dan bertanggung jawab atas pemanasan atmosfer yang sangat kuat melalui gas rumah kaca (terutama karbon dan metana). Polusi udara dan air adalah ciri khas dari jenis ekonomi ini, serta berbagai dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Bahan bakar fosil bukan hanya merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim yang menghancurkan peradaban, tetapi juga berkontribusi pada kematian jutaan orang setiap tahunnya. Jenis sistem ekonomi ini menitikberatkan pada pertumbuhan dan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. PDB Coklat

meletakkan tuntutan pada lingkungan kita yang melebihi daya dukung bumi dan mendorong eksploitasi tanpa batas terhadap sumber daya yang terbatas.

Akibatnya, kerusakan serta pencemaran lingkungan menjadi semakin umum. Dampak tersebut dapat mengganggu kehidupan manusia. Kepedulian global terhadap masalah lingkungan yang muncul telah berlangsung lama. Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Earth Summit* yang pertama dilaksanakan di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Di dalam konferensi itu, disepakati mengenai keterkaitan antara masalah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sejak waktu itu, gagasan pembangunan yang ramah lingkungan telah diterapkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan pembangunan.

Pada September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui delapan target *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disingkat MDGs. Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Tujuan dan Sasaran MDGs ada delapan yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim; (2) mencapai pendidikan dasar universal; (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) mengurangi tingkat mortalitas anak-anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; (7) menjaga kelestarian lingkungan hidup; serta (8) membina kerjasama global bagi pembangunan.

Untuk rencana ke depan sebagai lanjutan dari MDGs, sebuah konsep dirumuskan dalam konteks kerangka kerja/agenda pembangunan setelah 2015, yaitu *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs. Konsep SDGs diperlukan sebagai basis kerja pembangunan baru yang memperhitungkan semua perubahan setelah MDGs (2015). SDGs memiliki sasaran yang lebih

global. SDGs diperkenalkan untuk menggantikan MDGs dengan sasaran yang lebih tepat bagi tantangan di masa depan.

SDGs aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. Ada 17 tujuan SDGs yaitu sebagai berikut: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem laut; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan

Namun, untuk mencapai SDGs memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar perbaikan yang *superficial*. Diperlukan inovasi dalam model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin bahwa pertumbuhan tersebut bersahabat dengan lingkungan dan inklusif. Di sinilah prinsip “Ekonomi Hijau” memiliki peranan yang signifikan.

Istilah "Ekonomi Hijau" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh sekelompok ekonom lingkungan hidup asal Inggris melalui sebuah laporan berjudul “*Blueprint for a Green Economy*”. Selanjutnya, pada tahun 2008, konsep ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas berkat pengenalan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Sebagai bagian dari Inisiatif ini, UNEP meminta salah satu penulis *Blueprint for a Green Economy* untuk menyiapkan laporan berjudul *Global Green New Deal* (GGND), yang dirilis pada bulan April 2009.

Ekonomi hijau memiliki 3 pilar dan 15 indikator yaitu sebagai berikut:

1. **Pilar Ekonomi**, terdiri atas 6 indikator antara lain, intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa
2. **Pilar Sosial**, terdiri atas 4 indikator antara lain, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.
3. **Pilar Lingkungan**, terdiri atas 5 indikator antara lain, persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia, bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer, persentase sampah terkelola, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, dan penurunan tutupan lahan gambut.

Pilar ekonomi hijau yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi hijau tidak meninggalkan siapapun dibelakang atau dengan kata lain menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Ini berarti bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sekelompok elit, tetapi juga harus menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas. Tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif adalah

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sehingga tidak memperlebar ketimpangan pendapatan antar individu dan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Pemikiran mengenai pembangunan ekonomi inklusif pertama kali muncul pada tahun 1970-an, pada saat dunia menghadapi krisis energi yang berdampak signifikan pada perekonomian global. Pemikiran ini mengalami pengembangan lebih lanjut pada tahun 1990-an, ketika Bank Dunia mulai mempromosikan strategi pembangunan yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 1995, Bank Dunia menerbitkan laporan berjudul "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Strategi untuk Meningkatkan Kemakmuran." Dalam laporan tersebut, ditekankan pentingnya memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi serta akses terhadap manfaat yang dihasilkan

Konsep ini kemudian diadopsi oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2001, saat OECD menerbitkan laporan berjudul "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Menciptakan Kemakmuran untuk Semua". Laporan tersebut menekankan pentingnya menjamin partisipasi seluruh individu dalam pembangunan ekonomi sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya. Adapun aspek-aspek yang ditekankan dalam laporan ini meliputi pendidikan, kesempatan kerja, akses terhadap layanan kesehatan, serta hak-hak sosial lainnya.

Di Indonesia, sejak tahun 2013, pembangunan ekonomi inklusif telah menjadi fokus utama dalam perencanaan ekonomi. Pemerintah telah merumuskan berbagai strategi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif. Strategi ini mencakup berbagai aspek, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat yang kurang beruntung dalam proses pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Pada tahun 2015, Indonesia mengintegrasikan konsep ekonomi inklusif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di tanah air dengan menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar utama yaitu, sebagai berikut:

- 1. Pilar pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi** dengan sub pilar: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi
- 2. Pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan** dengan sub pilar: ketimpangan dan kemiskinan
- 3. Pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan** dengan sub pilar: kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan keuangan inklusif

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, salah satu pilar yang membahas pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, memiliki sub pilar yang menarik untuk dikaji yaitu pilar kedua dengan sub pilar ketimpangan. Sesuai dengan tujuan awal pembangunan ekonomi inklusif dirancang yaitu salah satunya mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah. Kelompok yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan “Gender”. Dapat diartikan

bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif itu sendiri adalah mengurangi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bukan berbicara soal “Kelamin” tetapi lebih daripada itu yaitu “Fungsi”. Fungsi antara laki-laki dan perempuan harus setara baik dalam tingkat rumah tangga, sosial masyarakat, maupun dunia kerja.

Pemberdayaan perempuan adalah kunci perubahan besar. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (*United Nation Women*). Menurut *United Nation Women* terdapat visi tujuan pembangunan berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan yang mendukung partisipasi perempuan yang setara dalam semua aspek kehidupan, dengan berfokus pada empat prioritas strategis:

1. Perempuan memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan
2. Perempuan memiliki jaminan pendapatann, pekerjaan layak dan otonomi ekonomi
3. Semua perempuan dan anak perempuan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan
4. Perempuan dan anak perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta tindakan kemanusiaan.

Kesenjangan gender tetap menjadi isu penting yang relevan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ironisnya, menurut laporan dari *World Economic Forum* (WEF), belum ada negara yang mampu mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh. Proyeksi menunjukkan bahwa, berdasarkan kemajuan saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 131 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender penuh antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, WEF mengakui bahwa beberapa negara telah berhasil menangani ketidaksetaraan gender dengan lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Pada tahun 2024, kesetaraan gender perlahan maju, laju perjalanannya sedemikian rupa. Namun, kesetaraan penuh tetap berada di luar jangkauan lima generasi berikutnya. Perjalanan menuju kesetaraan terpanjang untuk dimensi ekonomi dan politik indeks, dengan kecepatan kemajuan individu yang berbeda mengancam untuk menurunkan kemajuan kolektif secara keseluruhan. Secara global, kesetaraan gender di bidang ekonomi dan politik telah meningkat secara signifikan secara keseluruhan dalam posisi kepemimpinan senior, menteri, dan parlemen. Tindakan pemerintah dan bisnis sangat penting dalam memajukan target di tingkat nasional dan regional; hanya skala dan stabilitas intervensi yang tetap tidak memadai dalam menghadapi transformasi saat ini.

Pada tahun 2024, ekonomi Eropa menempati tujuh tempat di 10 besar global, terus mewakili sebagian besar negara dengan kinerja terbaik. Tiga tempat sisanya ditempati oleh ekonomi dari Asia Timur dan Pasifik (Selandia Baru, peringkat ke 4), Amerika Latin dan Karibia (Nikaragua, peringkat ke-6), dan Afrika Sub-Sahara (Namibia, peringkat ke-8). Evolusi 10 besar secara global dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

		Edition																	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
1 st		SWE	SWE	NOR	ISL														
2 nd		NOR	NOR	FIN	FIN	NOR	NOR	FIN	FIN	FIN	NOR	FIN	NOR	NOR	NOR	FIN	FIN	NOR	FIN
3 rd		FIN	FIN	SWE	NOR	FIN	FIN	NOR	NOR	NOR	FIN	NOR	FIN	SWE	FIN	NOR	NOR	FIN	NOR
4 th		ISL	ISL	ISL	SWE	RWA	FIN	SWE	NZL	NZL	NZL	NZL							
5 th		DEU	NZL	NZL	NZL	NZL	IRL	IRL	PHL	DNK	IRL	RWA	SWE	NIC	NIC	SWE	SWE	SWE	SWE
6 th		PHL	PHL	PHL	ZAF	IRL	NZL	NZL	IRL	NIC	RWA	IRL	NIC	RWA	NZL	NAM	RWA	DEU	NIC
7 th		NZL	DEU	DNK	DNK	DNK	DNK	DNK	NZL	RWA	PHL	PHL	SVN	NZL	IRL	RWA	NIC	NIC	DEU
8 th		DNK	DNK	IRL	IRL	LSO	PHL	PHL	DNK	IRL	CHE	SVN	IRL	PHL	ESP	LTU	NAM	NAM	NAM
9 th		GBR	IRL	NLD	PHL	PHL	LSO	NIC	CHE	PHL	SVN	NZL	NZL	IRL	RWA	IRL	IRL	LTU	IRL
10 th		IRL	ESP	LVA	LSO	CHE	CHE	CHE	NIC	BEL	NZL	NIC	PHL	NAM	DEU	CHE	DEU	BEL	ESP

Sumber: World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2024

Gambar 1.1 Evolusi Indeks Kesetaraan Gender Global 10 Besar Tahun 2006-2024

Noted:

BEL = Belgium; CHE = Switzerland; DEU = Germany; DNK = Denmark; ESP = Spain; FIN = Finland; GBR = United Kingdom; IRL = Ireland; ISL = Iceland; LSO = Lesotho; LTU = Lithuania; LVA = Latvia; NAM = Namibia; NIC = Nicaragua; NLD = Netherland; NOR = Norway; NZL = New Zealand; PHL = Philippines; RWA = Rwanda; SVN = Slovenia; SWE = Sweden; ZAF = South Africa

Periode 2006-2011, rata-rata negara yang menempati sepuluh teratas peringkat kesetaraan gender secara global adalah negara benua Eropa khususnya Eropa bagian Utara. Namun, uniknya negara dengan peringkat satu sampai empat secara global adalah negara Skandinavia, yaitu Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Dari tahun 2006-2007 kedudukan ke-empat negara tersebut belum berubah. Di tahun 2008 peringkat satu digeser oleh Norwegia menggantikan Swedia, Swedia menjadi peringkat ke-empat. Tahun 2009 Islandia naik menjadi peringkat satu menggantikan Norwegia, peringkat ke-dua Finlandia, dan peringkat ke-tiga menjadi Norwegia. Islandia mempertahankan posisinya menjadi peringkat satu sampai tahun 2024. Filipina menjadi satu-satunya negara dari benua Asia, khususnya Asia Tenggara yang berhasil menduduki peringkat kesetaraan gender 10 besar secara global.

Periode 2012-2017, Islandia masih mempertahankan peringkatnya di peringkat ke-1, Finlandia menggantikan Norwegia di peringkat ke-dua selama tiga tahun, kemudian di tahun 2015, Norwegia peringkatnya naik lagi menjadi peringkat ke-dua, kedua negara tersebut saling kejar-kejaran di posisi ke-dua. Filipina masih menduduki peringkat 10 besar secara global. Nikaragua menjadi satu-satunya negara dari Amerika Latin dan Karibia, yang menduduki 10 besar dari tahun 2012-2017. Pada tahun 2014-2017, Rwanda menduduki 10 besar secara global, dan menjadi satu-satunya negara dari Sub-Sahara Afrika, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan satu peringkat.

Periode 2018-2022, Islandia masih bertahan di posisi pertama, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Norwegia dan Finlandia masih saling memperebutkan posisi ke-dua. Di tahun 2018, menjadi tahun terakhir bagi

Filiphina masuk ke-10 besar secara global. Sub-Sahara Afrika berhasil menambahkan satu lagi negaranya ke 10 besar setelah Rwanda yaitu Namibia yang menempati peringkat ke-10 secara global. 2022 merupakan tahun terakhir bagi Rwanda menduduki peringkat 10 besar secara global. Selandia Baru berhasil menaikkan peringkatnya yang pada tahun 2018 Selandia Baru menempati peringkat ke 7, menjadi peringkat ke-empat dari tahun 2021-2022.

Tahun 2023-2024, ekonomi Eropa menempati tujuh tempat di 10 besar global, terus mewakili sebagian besar negara dengan kinerja terbaik. Tiga tempat sisanya ditempati oleh ekonomi dari Asia Timur dan Pasifik (Selandia Baru, peringkat ke-4), Amerika Latin dan Karibia (Nikaragua, peringkat ke-6), dan Afrika Sub-Sahara (Namibia, peringkat ke-8). Meskipun belum ada negara yang mencapai kesetaraan gender penuh, sepuluh negara teratas (Islandia, Finlandia, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Nikaragua, Jerman, Namibia, Irlandia dan Spanyol) telah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan mereka.

10 teratas terus menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi dalam konfigurasinya di seluruh edisi (Gambar 1.1). Sejak 2006, ekonomi Eropa telah menempati 68,3% dari 10 peringkat teratas; Ekonomi Asia Timur dan Pasifik, 16,7%; Ekonomi Afrika Sub-Sahara, 9,4%; dan ekonomi Amerika Latin dan Karibia, 5,6%. Hingga saat ini, tidak ada ekonomi dari Amerika Utara, Asia Tengah, Asia Selatan, atau Timur Tengah dan Afrika Utara yang masuk dalam 10 besar.

Skor kesenjangan gender global pada tahun 2024 untuk 146 negara yang termasuk mencapai 68,5% tertutup. Terdapat juga 10 besar negara yang termasuk dalam skor kesetaraan gender terendah secara global. Negara-negara ini umumnya

berasal dari kawasan Afrika Sub-Sahara (Nigeria, Kongo, Mali, Guinea, dan Chad), Timur Tengah (Maroko, Algeria, Iran, dan Sudan) dan Asia Selatan (Pakistan). Skor kesetaraan gender di 10 negara ini rata-rata skor kesetaraan gender berada dibawah 60%. Menurut Laporan *World Economic Forum* tahun 2024, berikut 10 negara dengan skor kesetaraan gender terendah secara global: (1) Sudan: 56.8%; (2) Pakistan: 57%; (3) Chad: 57,6%; (4) Iran: 57.9%; (5) Guinea: 60.1%; (6) Mali: 60.4%; (7) Kongo: 60.9%; (8) Algeria: 61.2%; (9) Nigeria: 62.8%; dan (10) Maroko: 62.8%.

Dibawah ini merupakan keadaan kesetaraan gender keseluruhan berdasarkan regional 2024 yang telah dirancang oleh *World Economic Forum*



Sumber: *World Economic Forum 2024, Global Gender Gap Index 2024*

Gambar 1.2 Kesetaraan Gender Berdasarkan Regional Tahun 2006-2024

Periode 2006-2011

Kesetaraan gender di kawasan Eropa awalnya berada dibawah Amerika Utara dengan persentase kira-kira 68%, di periode 2006-2011 kesetaraan gender di Eropa cenderung stagnan, sedikit sekali peningkatannya.

Kesetaraan gender di Asia Tengah awalnya sekitar 70%, menunjukkan kesetaraan gender yang relatif tinggi di kawasan tersebut. Ini telah meningkat secara bertahap tetapi tidak signifikan. Kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di Asia Tengah berjalan lambat dan menghadapi berbagai tantangan.

Dari tahun 2006-2011, Asia Timur dan Pasifik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam kesetaraan gender, sedikit lebih rendah dari Asia Tengah. Kedua kawasan memiliki pola perbaikan yang serupa, dengan Asia Timur dan Pasifik membuat kemajuan pada laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Asia Tengah.

Asia Selatan mulai dari 2006 memiliki skor kesetaraan gender 60%, lebih rendah dari Asia Tengah dan Timur. Dari 2006 hingga 2011, Asia Selatan menunjukkan peningkatan lambat namun stabil dalam kesetaraan gender, meskipun tidak signifikan dibanding wilayah lain. Meskipun ada sedikit kemajuan, kinerja kesetaraan gender di Asia Selatan masih lambat, menunjukkan perlunya upaya lebih untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Amerika Latin dan Karibia di periode tersebut awalnya berada digaris yang sama dengan Asia Timur dan Pasifik, namun di tahun 2007-2011 garis trennya menurun dibawah Asia Timur dan Pasifik, ini menandakan di periode tersebut Asia Timur dan Pasifik lebih unggul daripada Amerika Latin dan Karibia.

Amerika Utara menjadi kawasan kesetaraan gender tertinggi pada awal kemunculannya, bahkan melewati 70%, kawasan ini terus menerus meningkat

bahkan peningkatannya sangat tajam. Ini mengindikasikan kesetaraan gender di kawasan tersebut sangat baik.

Kawasan Sub-Sahara Afrika menjadi peringkat ke-tiga terendah secara regional, awal kemunculan kesetaraan gendernya berada dikisaran angka 62% tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan ditahun 2010-2011 garis trennya menurun.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi kawasan peringkat ke-satu terendah secara regional, awal kemunculannya dibawah 60%, kira-kira berada dikisaran angka 58% dan tidak mengalami perkembangan di periode 2006-2011 menjadikan kawasan tersebut dengan tingkatan kesetaraan gender terendah berdasarkan regional

Periode 2012-2017

Tahun 2012, skor kesetaraan gender Eropa 70%. Tahun 2013 sedikit meningkat, 2014-2015 meningkat pesat, lalu turun di 2016. Tahun 2017 skor Eropa meningkat lagi.

Tahun 2012 kawasan Asia Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dengan skor tertutup 70%, namun di tahun 2013- 2017 kawasan Asia Tengah peningkatannya tidak terlalu tinggi dapat dikatakan stagnan.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik menunjukkan skor kesetaraan gender yang fluktuatif antara tahun 2012 hingga 2017, dengan skor terendah 66% pada tahun 2012-2014. Tahun 2013-2015 mengalami peningkatan tidak signifikan, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan dan stagnasi pada tahun 2017.

Kawasan Asia Selatan mengalami fluktuasi skor kesetaraan gender antara 2012 hingga 2017. Skor meningkat pesat tahun 2012 dan 2013, menurun di 2014

namun tetap lebih tinggi dari 2011. Skor kembali meningkat antara 2015-2016, dengan puncaknya di 2016, tetapi turun drastis di 2017.

Kawasan Amerika Latin dan Karibia mengalami peningkatan skor dari 68% (2011) menjadi 69% (2012), 70% (2013), dan 72% (2014). Namun, skor menurun ke 70% dan stagnan dari 2015 hingga 2017.

Kawasan Amerika Utara memiliki tingkat paritas gender tertinggi secara global. Dari tahun 2012-2015, skornya berkisar antara 74-76%. Pada tahun 2016, Eropa menjadi yang tertinggi dengan skor 70%, menggantikan Amerika Latin. Di tahun 2017, skor meningkat menjadi 72%, tetapi masih di bawah Eropa.

Kawasan Timur Tengah memiliki nilai paritas kesetaraan gender terendah. Pada tahun 2012, skor kesetaraan gender meningkat menjadi 59%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 58%. Namun, pada tahun 2013 turun kembali ke 58%. Dari tahun 2014 hingga 2017, skor mengalami peningkatan kecil sekitar 60-62%. Kawasan Sub-Sahara Afrika pada tahun 2012 mengalami peningkatan skor kesetaraan gender sebesar 67% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 65%. Pada tahun 2013-2018 skor kesetaraan gender Sub-Sahara Afrika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berada di kisaran skor 66%-68%.

Perioder 2018-2022

Eropa sempat menjadi pemimpin dunia dalam kesetaraan gender dengan skor tertinggi pada tahun 2021 (77.6%). Namun, skor ini menurun menjadi 76.6% pada tahun 2022, sehingga posisi puncak direbut kembali oleh Amerika Utara. Secara keseluruhan, skor kesetaraan gender di Eropa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022.

Kawasan Asia Tengah pada tahun 2018-2022 memang mengalami peningkatan tetapi skornya tidak berubah signifikan, skor kesetaraan gender hanya

berada pada kisaran 69.1% sampai 71.1%.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik, tahun 2018-2022 capaian skor kesetaraan gender meningkat dari tahun ke tahun tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. 2018 skor kesetaraan gender sebesar 68.3%, 2020 sebesar 68.5%, 2021 sebesar 68.9%, dan tahun 2022 sebesar 69%.

Skor kesetaraan gender di Asia Selatan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai puncak 66.1% di tahun 2020, skor ini turun signifikan menjadi 62.3% di tahun 2021 dan sedikit membaik menjadi 62.4% di tahun 2022.

Skor kesetaraan gender di Amerika Latin dan Karibia secara umum meningkat dari tahun 2018 hingga 2022, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. 2018: 70.8%, 2020: 72.2%, 2021: 71.2%, dan 2022: 72.6%

Amerika Utara mengalami peningkatan bertahap dalam kesetaraan gender sejak tahun 2018, mencapai skor tertinggi sebesar 76.9% pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, menjadikan kawasan ini memimpin dunia dalam hal paritas gender.

Kesetaraan gender di Timur Tengah dan Afrika Utara masih rendah namun terus meningkat. Pada tahun 2018, angka kesetaraan gender adalah 60.2%, meningkat menjadi 63.4% pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan, kawasan ini masih tertinggal dari kawasan lain.

Kesetaraan gender di kawasan Sub-Sahara Afrika mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. 2018: Skor turun menjadi 66.3% dari tahun sebelumnya, 2020: Skor meningkat signifikan menjadi 68.2%, 2021: Skor kembali menurun menjadi 67.2%, dan tahun 2022: Skor meningkat sedikit

menjadi 67.9%.

Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, Eropa mencapai skor kesetaraan gender sebesar 76.3%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2022. Eropa tetap menjadi negara dengan kinerja global terbaik pada tahun 2024, dengan skor kesetaraan gender sebesar 75%, meskipun ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

Kawasan Asia Tengah, Tahun 2023-2022 skor kesetaraan gender di kawasan ini mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu yang signifikan dengan capaian skor sebesar 69% dan 69.1%

Kawasan Asia Timur dan Pasifik, tahun 2023-2024 kawasan ini juga mengalami peningkatan sama seperti Asia Tengah, Asia Timur dan Pasifik skor peningkatannya tidak terlalu signifikan dengan capaian skor sebesar 68.8% dan 69.2%

Kawasan Asia Selatan, Tahun 2023 Asia Selatan telah mencapai 63,4% gender paritas gender, skor terendah kedua secara global dari delapan wilayah. Tahun 2024 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dengan skor sebesar 63.7%.

Amerika Latin dan Karibia telah membuat kemajuan menuju kesetaraan gender sejak tahun 2017, menjembatani 74.3% kesenjangan gender pada tahun 2023. Peringkat ketiga secara global dengan skor paritas gender secara keseluruhan sebesar 74.2%.

Kawasan Amerika Utara, tahun 2023 tepat di belakang Eropa, Amerika Utara berada di peringkat kedua, setelah menutup 75% dari kesenjangan, yaitu 1,9 poin persentase lebih rendah dari edisi sebelumnya edisi sebelumnya. Tahun 2024

skor kesetaraan gender Amerika Utara menurun tetapi tidak signifikan dengan capaian sebesar 74.8%

Dibandingkan dengan wilayah lain, Timur Tengah dan Afrika Utara tetap menjadi yang terjauh jauh dari paritas, dengan skor paritas 62,6%. Ini adalah penurunan 0,9 poin persentase dalam paritas sejak edisi terakhir untuk wilayah ini. Di tahun 2024 tetap menjadi kawasan terendah pertama secara global dengan skor lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 61.7%

Skor paritas Afrika Sub-Sahara adalah yang ketiga terendah di antara delapan wilayah di 68,2%, berada di atas Asia Selatan dan Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun 2024 skor kesetaraan gender meningkat walaupun tidak signifikan dengan capaian skor sebesar 68.4%

Penghitungan skor paritas kesetaraan gender menurut *World Economic Forum* menggunakan angka nol (0) sampai dengan satu (1). Jika kesetaraan mendekati angka nol (0) maka menunjukkan ketimpangan sempurna dan jika kesetaraan mendekati angka satu (1) maka menunjukkan kesetaraan sempurna. Penghitungan ini juga berlaku untuk mengukur ketimpangan sering disebut juga dengan “Gini Rasio”. Namun, penghitungan gini rasio kebalikan dari penghitungan kesetaraan. Dimana jika mendekati angka nol (0) maka menunjukkan kesetaraan sempurna dan jika mendekati angka satu (1) maka menunjukkan ketimpangan sempurna. Dibawah ini dapat dilihat tabel 10 Negara Teratas dengan Gini Rasio (%) Tertinggi menurut *World Bank*.

Tabel 1.1 10 Negara Teratas dengan Gini Rasio (%) Tertinggi

Negara	Gini Rasio (%)
Afrika Selatan	63
Haiti	60
Namibia	59
Suriname	58
Honduras	55
Kolombia	55
Eswatini	55
Botswana	53
Belize	53
Brazil	52

Sumber: *World Bank*

Negara-negara pada daftar diatas memiliki tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Ini berarti sebagian sebagian besar kekayaan di negara-negara ini terkonsentrasi pada segilintir orang kaya, sementara sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan atau memiliki pendapatan yang sangat rendah. Sebagian besar negara dengan rasio tertinggi di dunia terletak di kawasan Amerika Latin dan Afrika. Bahkan 10 negara tersebut nilai gini rasionya >50%, ini dapat diartikan ketimpangan di negara-negara tersebut sangat tinggi. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *World Bank*, Afrika Selatan mencatatkan sebagai negara yang gini rasionya tertinggi dengan gini rasio sebesar 63%. Ketimpangan di Afrika Selatan dipengaruhi oleh sejarah *apartheid*, dimana sistem segregasi rasial menyebabkan perbedaan ekonomi yang sangat tajam antara penduduk kulit putih dan kulit hitam. Selain Afrika Selatan (63%) terdapat juga negara-negara lain, seperti Haiti (60%), Namibia (59%), Suriname (58%), Honduras (55%), Kolombia (55%), Eswatini (55%), Botswana (53%), Belize (53%), dan Brazil (52%).

Selain 10 negara teratas dengan gini rasio tertinggi, dibawah ini dapat dilihat pada tabel 1.2 10 negara teratas dengan gini rasio terendah.

Tabel 1.2 10 Negara Teratas dengan Gini Rasio (%) Terendah

Negara	Gini Rasio (%)
Slovakia	24
Slovenia	24
Belarusia	24
Ukraina	26
Moldova	26
Belanda	26
Islandia	26
Republik Ceko	26
Kirgistan	26
Uni Emirat Arab	26
Belgia	27

Sumber: *World Bank*

Negara-negara pada daftar diatas memiliki tingkat ketimpangan yang sangat rendah, bahkan 10 negara tersebut memiliki rata-rata nilai rasio gini yang sangat jauh dari angka 40%, ini berarti ketimpangan di negara-negara tersebut sangat rendah. Artinya distribusi pendapatan lebih merata, pendapatan atau kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada orang kaya saja. Sebagian besar penduduk hidup dalam ekonomi yang sangat kecukupan. Sebagian besar negara dalam daftar ini berasal dari kawasan Eropa Timur, seperti Slovakia, Slovenia, Belarusia, dan Ukraina. Kirgistan dan Uni Emirat Arab satu-satunya negara yang berasal dari Asia Tengah dan Timur Tengah.

Melihat gambaran besar tentang kesetaraan gender dan ketimpangan yang terjadi di dunia, kondisi di Indonesia menarik untuk dicermati. Isu ini telah menjadi perhatian yang signifikan di dalam negeri sendiri. Meskipun kesetaraan gender merupakan isu global, penerapannya menunjukkan karakteristik yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia, dengan populasi yang besar dan tingkat kesenjangan yang tinggi, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender menjadi lebih kompleks. Problematika ini tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural,

tetapi juga memiliki akar yang dalam pada budaya masyarakat, yaitu sistem patriarki.



Sumber: *World Bank 2023, diolah 2025*

Gambar 1.3 Gini Rasio Indonesia 2019-2023

Gini rasio adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (0) sampai satu (1), dimana nol (0) menunjukkan pemerataan sempurna dan satu (1) menunjukkan ketimpangan sempurna. Gini rasio diambil dari nama ahli statistik asal Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1912 (Todaro, 2004).

Berdasarkan data gini rasio Indonesia diatas yang bersumber dari *World Bank*, gini rasio Indonesia pada tahun 2019-2022 nilainya mengalami fluktuasi, namun di tahun 2023 nilai gini rasionya melonjak cukup signifikan, hal ini berarti ketimpangan agregat di Indonesia pada tahun 2023 cukup tinggi. Pada tahun 2019 nilai gini rasio Indonesia adalah 35.4%, kemudian turun pada tahun 2020 dengan nilai gini rasio sebesar 35.3%, pada tahun 2021 nilai gini rasionya kembali meningkat dengan capaian sebesar 35.5%. Pada tahun 2022 nilai gini rasio

Indonesia tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya atau stagnan, dengan nilai gini rasio 35.5%. Peningkatan gini rasio yang terjadi pada tahun 2023 menjadi 36.1% menunjukkan adanya tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, ataupun penurunan efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan. Kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023 dapat menjadi perhatian bagi pemerintah, karena bisa berpotensi di tahun selanjutnya menunjukkan tren ke arah ketimpangan yang lebih besar. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi inklusif dan ketimpangan juga dapat memicu ketidakstabilan sosial, seperti demonstrasi dan ketidakpuasan publik. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan ini.

Hasil temuan data diatas yang bersumber dari *World Bank* sejalan dengan temuan data statistik dalam negeri yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mengenai ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami kesenjangan tertinggi rata-rata upah per jam yang diterima laki-laki dan perempuan, dengan selisih mencapai 23%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki menerima upah rata-rata per jam yang 23% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki mendapatkan upah sebesar Rp. 20.125/jam sedangkan perempuan hanya mendapatkan Rp. 16.779/jam, angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015 (Badan Pusat Statistik).

Setelah membahas gini rasio dan ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, gambar 1.4 dibawah ini merupakan profil Indonesia secara global terkait kesetaraan gender di tahun 2024,



Sumber: *World Economic Forum, Global Gender Gap 2024*

Gambar 1.4 Profil Kesetaraan Gender Global Indonesia Tahun 2024

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, Peringkat ke-100 dalam indeks ditempati oleh Indonesia yang pada tahun 2024 telah menutup 68,6% dari kesenjangan. Hasil ini menunjukkan penurunan 13 peringkat dan penurunan -1,1 poin dari tahun 2023. Paritas ekonomi mencapai 66,7%, menemukannya di urutan ke-89 secara keseluruhan, membuktikan kesenjangan yang signifikan di tingkat indikator. Salah satu indikator tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana kesetaraan gender mencapai 64,5%. Sementara perempuan terlalu terwakili dalam peran profesional dan teknis sejauh kesetaraan penuh, yang terjadi justru untuk posisi legislatif, pejabat senior, dan manajerial, di mana kesetaraan berada di 46,3%. Selain itu, perkiraan pendapatan yang diperoleh wanita hanya setengah dari pria, menghasilkan skor paritas 51,7%. Dalam subindeks Pemberdayaan Politik, Indonesia mendapat skor 13,8%, dengan paritas di tingkat menteri tetap statis dari tahun 2023 sebesar 26,1%. Dalam Pencapaian

Pendidikan, Indonesia mengkompensasi dengan paritas 97,1%, dengan kesetaraan yang terlihat jelas dalam pendaftaran menengah dan tersier. Namun, kesetaraan gender dalam pendaftaran pendidikan dasar telah menurun sejak 2015 karena pangsa pendaftaran laki-laki telah meningkat, bergulir kembali ke 94,9% pada tahun 2024. Tingkat melek huruf tetap tinggi di 97%. Dalam hal Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, Indonesia mencapai kesetaraan 97%, menempati peringkat ke-72 secara global.

Gambar 1.5 dibawah ini menggambarkan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2018-2023. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan hanya berbeda sedikit sekali bahkan perbedaan jumlah penduduknya dibawah 5% baik dari tahun 2018-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, Infografis oleh Indonesiabaik.id

Gambar 1.5 Jumlah Penduduk di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin

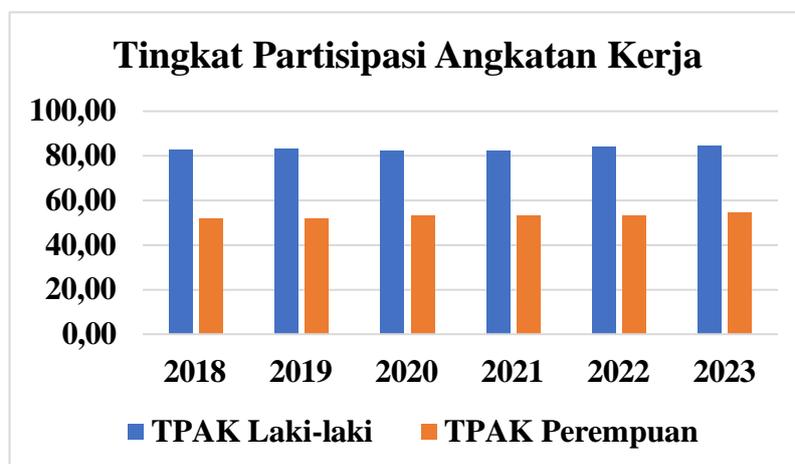
Melihat hasil data sensus penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum, jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki memang lebih banyak daripada perempuan. Pada gambar 1.15 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2023

adalah sebanyak 140.786,8 orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan tahun 2023 adalah sebanyak 137.909,4 orang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa per tahun 2023, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan terbilang cukup seimbang, dengan proporsi penduduk laki-laki mencapai 50,08%, sedangkan proporsi penduduk perempuan berada di angka 49,92%.

Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir seimbang, pada tahun 2023, jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih tergolong rendah, jauh di bawah jumlah pekerja laki-laki. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan gender yang cukup besar dalam partisipasi dan akses perempuan terhadap peluang ekonomi.

Data dari BPS mencatat bahwa pada tahun 2023, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya mencapai 54,52%, jauh di bawah angka 84,26% yang tercatat untuk laki-laki. Terdapat perbedaan signifikan dalam partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan, meskipun jumlah populasi keduanya hampir sebanding. Angka tersebut mencerminkan masih adanya berbagai hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam dunia kerja. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 1.6 dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Gambar 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan 2018-2023

Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, perubahan perlu dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yang harus diambil adalah pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, guna menjamin bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini, peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen menjadi sangat penting, sehingga mereka dapat merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Namun, kita juga harus menyadari bahwa kebijakan dan undang-undang saja tidak cukup untuk mencapai tujuan ini. Implementasi yang efektif dan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah kunci keberhasilan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengatasi stereotip dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender. Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender. Contoh positif seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, serta dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan merupakan upaya yang dapat diterapkan secara lebih luas.

Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi dalam bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keterwakilan politik

bagi perempuan. Masalah ini menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah baru yang akan datang.

Dengan uraian, paparan latar belakang dan fakta yang ada disertai dengan data yang mendukung, terdapat permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia yang nantinya akan menghambat laju pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia itu sendiri. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Maka untuk itu penelitian ini berjudul **“Analisis Kesetaraan Gender dalam rangka Mencapai Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar ke-2 di Indonesia”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Sektor pertanian sering diabaikan padahal sektor tersebut penentu keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang suatu negara.
2. PDB Coklat tidak memasukkan aspek keberlanjutan lingkungan
3. Ekonomi hijau memerlukan koordinasi yang lebih baik antara sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, serta perubahan perilaku konsumen.
4. Membutuhkan 131 tahun untuk mencapai kesetaraan gender penuh antara laki-laki dan perempuan di dunia
5. Peringkat kesetaraan gender Indonesia secara global menurun sebesar 13 peringkat tahun 2024
6. Kesetaraan gender dalam hal partisipasi kerja di Indonesia masih jauh dari ideal.

7. Gini rasio di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai analisis kesetaraan gender dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif khususnya pilar kedua di Indonesia pada tahun 2014-2023 sebagai tahun yang digunakan.

1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan indikator pilar kedua pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia pada tahun 2014-2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia?
3. Bagaimana Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan provinsi di Indonesia 2023?

1.4.2. Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang ketimpangan pendapatan, sumbangan pendapatan perempuan, persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.
2. Melakukan estimasi tentang pengaruh variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga

Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia

3. Melakukan analisa tipologi klassen tentang Indeks Kesetaraan Gender (IKG) di provinsi Indonesia tahun 2023

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini nantinya dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis kesetaraan gender dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif pilar kedua di Indonesia

1.5.1. Manfaat Akademik

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi dalam memperoleh Sarjana Ekonomi
2. Sebagai bahan studi atau tambahan kajian bagi mahasiswa serta dosen dalam menganalisis penelitian terkait kesetaraan gender di Indonesia
3. Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama

1.5.2 Manfaat Non-Akademik

Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, 1994).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kondisi yang penting dan utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah yang dibarengi kebutuhan konsumsi sehari-hari maka dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahunnya (Rahayu, 2020).

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs).
2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli:

1. Aliran Klasik

A. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya

demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen, dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith, pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa

kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen, dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus-menerus. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan teori Adam Smith:

- a. Pengabaian masyarakat secara luas.
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

B. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital

yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

C. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab

utama keterbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

D. Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap:

- a. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
- b. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dan sebagainya. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik faktor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.

- c. Masyarakat feodal, kaum bangsawan memiliki faktor produksi utama yaitu tanah. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sektor pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya sistem feodal. Kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tarif serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum feodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai sistem ini.
- d. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
- e. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengiuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

2.1.2. Produk Domestik Bruto Coklat (Brown GDP)

1. Cara Baru Menghitung Produk Domestik Bruto

Cara baru menghitung Produk Domestik Bruto (selanjutnya disingkat menjadi PDB) yang telah menginternalisasikan faktor-faktor kerusakan lingkungan, tampaknya masih akan mengundang kontroversi. Memang tidak mudah untuk mengubah sistem perhitungan PDB yang sudah baku diterapkan di seluruh dunia sejak lebih dari setengah abad. Meski demikian, optimisme untuk mewujudkan keinginan itu bukannya menjadi tipis, mengingat banyak negara yang semakin menyadari perlunya menjaga kelestarian lingkungan.

Apabila terjadi kerusakan lingkungan disuatu negara maka akan

mendorong pemerintah untuk melakukan restorasi. Upaya pembangunan kembali ini merupakan aktivitas yang bernilai ekonomitertentu. Dengan kata lain, usaha-usaha untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar itu akan menyebabkan ekspansi pada berbagai pos belanja (*spending*). Dampak adanya belanja barang dan jasa ini justru sangat positif bagi perekonomian makro, karena dengan demikian akan mendorong variabel konsumsi (C) dan investasi (I). Ujung-ujungnya, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan.

Proses dorongan terhadap PDB semacam inilah yang dianggap sebagai bias (*misleading*) dalam perhitungan pendapatan nasional. Disinilah kemudian timbul ironi itu di satu pihak, kerusakan lingkungan bersifat merugikan namun dipihak lain justru bisa meningkatkan gairah perekonomian yang dapat mendorong angka PDB.

Agar angka-angka PDB yang selama ini kita kenal tidak mengalami bias semacam itu, maka diperlukan sebuah formulasi baru. Karena variabel PDB baru ini mencoba menginternalisasikan eksternalitas lingkungan, maka ia disebut sebagai “PDB Hijau” (*green gdp*), sebagai revisi terhadap variabel lama yang disebut “PDB Coklat” (*brown gdp*).

2. Metode Perhitungan Baru

Kelemahan yang melekat pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah, ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi (termasuk lingkungan) sebagai determinan penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak bisa berbicara mengenai tingkat kesejahteraan riil, maka *United Nations Development Programme* (selanjutnya disingkat menjadi UNDP) mengambil inisiatif untuk menghitung variabel PPP

(*Purchasing Power Parity*), sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seseorang.

Karena persoalan-persoalan semacam itulah, maka timbul kesadaran untuk melestarikan pendapatan. Artinya, pendapatan yang kita peroleh harus dipertahankan, atau “diawetkan” selama mungkin (*income is sustainable*). Pada dasarnya, filosofi dari gagasan ini sudah dilontarkan lama, bahkan sejak J. Hicks menuliskan bukunya, *Value and Capital* (Oxford University Press, 1946).

Atas dasar itulah, maka Iokakarya yang diselenggarakan Bank Dunia di Paris, 21-22 November 1988, menghasilkan rumusan baru sebagai berikut:

NDP = PDB - konsumsi atau menipisnya sumber daya modal yang dihasilkan oleh manusia,

NDP = PDB - konsumsi atau menipisnya sumber daya alam.

dimana NDP adalah *Net Domestic Product*, atau PDB neto, atau PDB dengan cara perhitungan yang baru.

Sementara itu, pada konferensi di Brussels 31 Mei-1 Juni 1995, muncul formulasi berikut:

PDB = Output Total – Input Antara (*Intermediate Input*)

NDP = PDB – depresiasi modal tetap

Pendapatan Nasional Bruto = PDB + pendapatan neto dari luar negeri

Pendapatan Nasional Neto = NDP + pendapatan neto dari luar negeri

Dengan menggunakan formulasi baru tersebut, maka PDB yang sekarang berlaku perlu revisi. Dalam kasus Meksiko misalnya, dapat dihitung danya depresiasi bagi sumber daya modal (11 persen), depresiasi sumber daya alam

(menipisnya kemampuan tanah, 5 dan degradasi sumber aya alam (7 persen). Secara keseluruhan, metode perhitungan yang baru telah menurunkan tingkat PDB Meksiko dengan 23 persen. Dengan kata lain, PDB Meksiko tinggal sekitar 77 persen saja dari nominal yang berlaku (Bartelmus, Lutz, dan Schweinfest, 1992).

Sedangkan untuk kasus Indonesia, studi yang dilakukan oleh *The World Resources Institute, Washington DC* (1989) menunjukkan, bahwa pertumbuhan PDB selama periode 1971-1984 dengan metode baru (*adjusted GDP*) ternyata hanya 4%. Padahal dengan metode lama angka pertumbuhannya dalah 7,1%. Perhitungan itu dihasilkan dengan cara mengurangi angka PDB konvensional dengan depresiasi, yang ditimbulkan oleh ekstraksi minyak, penebangan kayu, dan pemiskinan kualitas tanah (R. Repetto dkk, *Wasting Assets: Natural Resources in the National Accounts*, 1989). (A. Tony Prasetyantono dalam bukunya berjudul *Agenda Ekonomi Indonesia*, 1995)

2.1.3. Pembangunan Ekonomi Inklusif

1. Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut *World Economic Forum (WEF)* ekonomi inklusif merupakan upaya dalam rangka peningkatan kinerja perekonomian dengan cara memberikan akses yang luas kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran ekonomi. Namun, definisi menurut *World Economic Forum* ini tidak dengan mudah dapat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal budaya dan kondisi sosial, serta faktor seperti disparitas yang ada di Indonesia.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), penyerapan energi kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) dan memperhatikan lingkungan (*pro-environment*) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).

Kemudian mulai tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tingkat nasional. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, diharapkan dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan yang lebih merata. Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang secara adil dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh golongan masyarakat, serta dapat mengurangi ketimpangan yang ada di antara kelompok maupun wilayah.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan yang tidak hanya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga melalui aspek sosial ekonomi lain, sesuai yang termuat dalam 21 indikator yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat mendorong pembangunan menjadi lebih inklusif.

2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi inklusif dikenal dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Dibawah ini dapat dilihat pada gambar 2.1 pilar dan sub-pilar pembangunan ekonomi inklusif secara lengkap.



Sumber: The SMERU Research Institute, 2023

Gambar 2.1 Pilar dan Sub-Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pilar 1 yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar ini memiliki tiga sub-pilar. Sub-pilar yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, pertumbuhan PDRB Riil per kapita, *share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Sub-pilar yang kedua yaitu kesempatan kerja, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, tingkat kesempatan kerja, persentase tenaga kerja dengan jam kerja ≥ 35 jam/minggu, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Sub-pilar yang ketiga adalah infrastruktur ekonomi, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, persentase rumah tangga menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk memiliki telepon genggam, dan rasio jalan mantap terhadap luas wilayah.

Pilar 2 yang merupakan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, pilar ini memiliki dua sub-pilar. Sub-pilar yang pertama adalah ketimpangan, sub-pilar ini memiliki tiga indikator yaitu, rasio gini, sumbangan

pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. Sub-pilar yang kedua adalah kemiskinan, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

Pilar 3 yang merupakan perluasan akses dan kesempatan, pilar ini memiliki tiga sub-pilar. Sub-pilar yang pertama adalah kapabilitas manusia, sub-pilar ini memiliki tiga indikator yaitu, harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Sub-pilar yang kedua adalah infrastruktur dasar, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak dan persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri. Sub-pilar yang ketiga adalah keuangan inklusif, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, rasio jumlah dana pihak ketiga dengan jumlah penduduk usia produktif dan rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening secara keseluruhan.

2.1.4. Gender

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat dengan kata lain gender merupakan sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2018).

Gender selain sebagai perbedaan jenis kelamin juga perbedaan karakter dan kedudukan yang digambarkan serta dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Bias gender pada berbagai aspek telah membawa perempuan pada situasi terkungkung tidak selayaknya manusia pada dasarnya.

- **Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)**

Feminis *Jurisprudence* muncul pada akhir tahun 1960 mengikuti pergerakan kaum feminis Amerika. Kemunculan feminis jurisdiksen merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Hal ini disebabkan teori-teori hukum, system hukum, dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara tidak berwawasan perempuan. Sehingga tidak ada hukum yang membicarakan hak perempuan. Hukum adalah aspek negara yang harus lebih diperhatikan terlebih menghubungkannya dengan teori kesetaraan gender. Hukum diakui sebagai alat yang sangat kuat sebagai ketentuan yang legal. Dengan kaidah hukum atau hukum bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender tentu akan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang tidak berkembang. Terlebih legalitas hukum yang tidak mengcover hak perempuan merugikan secara langsung dan parahnya berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan (Weisberg, 1993).

Weisberg kemudian mengemukakan beberapa teori *Feminist Legal Theory* yang dipengaruhi aliran feminis sebelumnya: (1) Menurut *Feminist Legal Theory* negara, hukum, dan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atau malah sebaliknya; (2) Penganut aliran feminis yang notabene adalah perempuan merasa tidak terlindungi dengan sistem hukum yang diberlakukan, karena kerap kali terjadi perubahan struktur hukum maupun struktur sosial di dalam suatu komunitas global ataupun hubungan antara teori dan praktek yang terjadi, yang dielaborasi dalam suatu kasus tertentu dengan efek tertentu; (3) Kelompok *Female Legal Theory* berasumsi bahwa hukum adalah produk ideologi tertentu,

yakni idiologi yang dianut kaum laki-laki. Sehingga hukum yang lahir seksis, bias gender. Hukum adalah cerminan laki-laki, hukum adalah untuk mempertahankan sifat maskulin laki-laki.

2.1.5. Tenaga Kerja

Menurut *International Labour Organization* tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 tahun atau lebih, dan telah melakukan pekerjaan berbayar setidaknya satu jam dalam seminggu. Definisi ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan, termasuk karyawan, wiraswasta, dan pembantu keluarga. *International Labour Organization* juga mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja juga disebut sebagai populasi penduduk yang aktif secara ekonomi.

1. Produksi Marjinal Tenaga Kerja

Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan perusahaan, semakin banyak output yang diproduksi. Produk marjinal tenaga kerja (*marginal product of labor*) adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan, dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Dibawah ini dapat kita gambarkan dengan menggunakan fungsi produksi:

$$MPL = F(K, L + 1) - F(K, L).$$

Simbol pertama pada sisi kanan adalah jumlah output yang diproduksi dengan K unit modal dan L + 1 unit tenaga kerja; simbol kedua adalah jumlah output yang diproduksi dengan K unit modal dan L unit tenaga kerja. Persamaan ini menyatakan bahwa produk marjinal tenaga kerja adalah perbedaan antara jumlah output yang diproduksi dengan L + 1 unit tenaga

kerja dan jumlah yang diproduksi hanya dengan L unit tenaga kerja

2. Produk Marjinal Tenaga Kerja ke Permintaan Tenaga Kerja

Ketika sedang memutuskan apakah akan menggunakan satu unit tenaga kerja tambahan atau tidak, perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba mempertimbangkan bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi laba. Karena itu, perusahaan membandingkan penerimaan ekstra dari kenaikan produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja tambahan terhadap biaya tambahan dalam bentuk upah yang lebih banyak. Peningkatan penerimaan dari satu unit tenaga kerja tambahan bergantung pada dua variabel: produk marjinal tenaga kerja dan harga output. Karena tenaga kerja tambahan memproduksi unit output MPL dan setiap unit output dijual seharga P dolar, penerimaan tambahan adalah $P \times MPL$. Biaya ekstra karena menggunakan lebih banyak tenaga kerja adalah upah W. Jadi, perubahan dalam laba karena menggunakan lebih banyak tenaga kerja adalah

$$\begin{aligned}\Delta \text{Laba} &= \Delta \text{Penerimaan} - \Delta \text{Biaya} \\ &= (P \times MPL) - W\end{aligned}$$

Simbol Δ (disebut *delta*) menyatakan perubahan sebuah variabel

3. Tenaga Kerja Wanita

Menurut Tambunan (1992), tenaga kerja wanita adalah bagian dari penduduk yang secara ekonomis potensial untuk terjun ke dalam pasar tenaga kerja dan bertindak sebagai angkatan kerja. Dengan demikian, tidak lagi dapat dibedakan atas dasar gender, ketika seseorang sudah berada dalam jajaran pasar tenaga kerja. Secara makro, maka setiap orang yang berada dalam jangkauan pasar tenaga kerja, baik pria maupun wanita, akan bersaing

ketat untuk memperoleh pekerjaan. Mengingat bahwa dalam jenjang pendidikan saat ini antara pria dan wanita mempunyai kesamaan hak dan kesempatan kerja juga menjadi semakin terbuka bagi wanita, maka partisipasi tenaga kerja wanita terus meningkat dari tahun ke tahun.

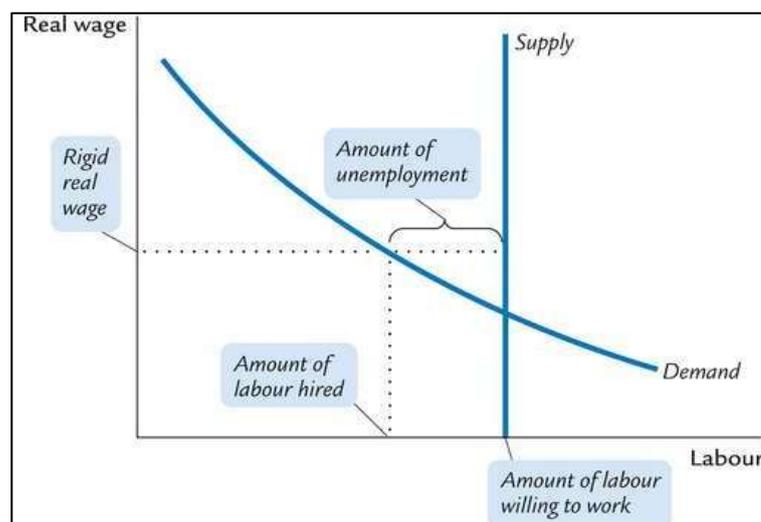
Pada umumnya wanita bekerja bukanlah semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga banyak wanita yang bekerja di bidang formal dan informal. Wanita sebagai pencari nafkah berusaha untuk membantu atau menunjang perekonomian keluarganya. Kegiatan mencari nafkah bagi wanita adalah segenap kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga, di luar pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan bagi dirinya ataupun bagi keluarganya (Aswiyati, 2016). Pada sektor industri, wanita banyak dipekerjakan pada bidang-bidang yang tidak membutuhkan keterampilan atau produktivitas yang rendah sehingga memungkinkan mereka mendapatkan upah yang cenderung sedikit (Kusuma, 2012).

4. Upah

Menurut Chusna (2013) upah merupakan salah satu motivator bagi para tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas kerjanya karena upah adalah imbalan yang akan diterima oleh seorang pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, dimana semakin tinggi upah yang diberikan maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Yang dimaksud upah dalam hal ini adalah balas jasa berupa uang atau jasa lain yang diberikan oleh lembaga, perusahaan maupun industri kepada para tenaga kerjanya sebagai harga dari tenaga yang

dikerahkan dalam kegiatan produksi dan bertujuan untuk melindungi keberadaan dan semangat kerja karyawan di perusahaan serta menjaga perusahaan sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Mankiw (2012), rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu tidak mampunya upah dalam melakukan penyesuaian sampai dititik ekuilibrium, dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. rendahnya penyerapan tenaga kerja yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia.



Gambar 2.2 Upah Tenaga Kerja

Pada Gambar 2.2 menunjukkan upah yang berlaku, jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta, sehingga banyak pekerja hanya menunggu pekerjaan tersedia. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisien,

kita haruslah menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan insentif.

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai denganketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

2. Upah Nyata

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang berhak.

3. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosialkeluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

5. Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan.

2.1.6 Pendidikan

Menurut teori Von Thunen (1961), pendidikan tinggi mengarah pada peningkatan kesempatan kerja, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan pendapatan. Tren ini terbukti dalam tingkat melek huruf alfabet di berbagai negara. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial. Salah satu cara untuk melihat hal ini adalah dengan melihat persentase penduduk yang melek huruf. Digunakan untuk mengukur kemajuan suatu daerah. Dengan menggunakan keterampilan menulis dan membaca ini, warga dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan.

Angka Melek Huruf dengan memakai teori dari Von Thunen (1961) bahwa pendidikan yang tinggi membangun lapangan kerja sebagai akibatnya menghasilkan pendapatan yang besar. dari BPS (2018) Indikator yang dapat mengukur kesejahteraan sosial yaitu menggunakan cara melihat rendah dan tingginya persentase jumlah penduduk yang melek huruf. Dijadikan untuk mengukura didalam kemajuan suatu daerah. menggunakan ini kemampuan menulis serta membaca yang bisa dimiliki seorang dapat mendorong penduduk buat bisa berperan lebih aktif didalam proses pembangunan.

2.1.7 Kesehatan

Pentingnya kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi inti dari kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator untuk melihat kesehatan di suatu wilayah yaitu dengan angka harapan hidup di suatu wilayah tersebut. Menurut *World Health Organization* (dalam Todaro, 2004:440) sehat itu meliputi sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan fisik. Seseorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi.

Menurut Sukirno (dalam Wahyuni, 2012:34) tolak ukur kesehatan yang berhubungan dengan status kesehatan baik perorangan maupun masyarakat disuatu daerah dapat dilihat dari:

- a. Angka kelahiran dan angka kematian
- b. Angka kesakitan
- c. Angka harapan hidup
- d. Angka yang menyangkut proses persalinan

Perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan produktifitas mereka terutama yang bekerja. Hal ini disebabkan karena meningkatnya efisiensi kerja dimana kemampuan fisik dan mental mereka lebih baik sehingga hasil yang mereka terima akan lebih besar. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh baik pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang nantinya tercermin dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin didaerah tersebut.

2.1.8 Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di parlemen atau dalam kehidupan politik sangat penting karena akan memberi peluang dipertimbangkannya suara, kepentingan, dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspirasi perempuan dapat terwakili dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender (Kemenpppa, 2020). Keterlibatan perempuan di parlemen atau dalam kehidupan politik mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah tingkat lokal maupun nasional masih tergolong rendah. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung dengan tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak terrealisasikan kekhawatiran perempuan dan prioritas-prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah dan kemungkinan akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial Tingkat lokal. Hal ini merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam tidak hanya di bidang eksekutif tetapi juga di bidang yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender.

2.1.9 Tipologi Klassen

Analisis tipologi kelas merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah (Sjafrisal, 2008:180). Tipologi pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: (1) daerah maju dan cepat tumbuh (*high income*

and high income), (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (3) daerah relatif tertinggal (*low growth but low income*), dan (4) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)

KUADRAN II DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN	KUADRAN I DAERAH MAJU DAN TUMBUH PESAT
KUADRAN III DAERAH RELATIF TERBELAKANG	KUADRAN IV DAERAH BERKEMBANG

Sumber: Buku Ekonomi Regional

Gambar 2.3 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah

2.2. Regulasi

2.2.1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Konvensi ini Menetapkan prinsip-prinsip mengenai Hak Asasi Perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

2.2.2 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Kegiatan analisa gender meliputi: (a). Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan; (b). Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya; (c). Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (d). Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Samsul Arifin (2020)	Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kesetaraan gender di Indonesia yang dilihat dari keadaan IPG dari 34 provinsi, selama 7 tahun indikator IPG semakin meningkat artinya kesetaraan gender semakin membaik. Indikator selisih (IPG-IPM) dan rasio (IPM/IPG) sebagai indikator kesetaraan gender memperkuat

				<p>kesimpulan terjadinya perbaikan kesetaraan gender. Keadaan perbaikan kesetaraan gender didukung oleh data AHH, RLS dan TPAK laki-laki dan perempuan yang menunjukkan bahwa terdapat angka yang besarnya berbeda dengan selisih yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kesenjangan gender memang masih terjadi walaupun dengan perkembangan yang terus membaik. Kedua, peran kesetaraan gender dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan positif baik yang terkait dengan kesetaraan bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan bidang kesehatan.</p>
2	Nadila Dwi Adika dan Farida Rahmawati (2021)	Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia	Angka Harapan Hidup, Ketimpangan Gender, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Pengeluaran per Kapita, dan Rata-rata Lama Sekolah	<p>a. Pada AHH perempuan dan laki-laki memiliki kesimpulan hasil regresi yang berbeda. Yaitu ketika AHH perempuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPEI di Indonesia, namun pada AHH laki-laki yaitu berpengaruh tidak signifikan terhadap IPEI di Indonesia.</p> <p>b. Pada RLS perempuan dan laki-laki memiliki kesimpulan hasil regresi yang berbeda. Yaitu ketika RLS perempuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPEI di Indonesia, pada RLS laki-laki berpengaruh tidak signifikan terhadap IPEI di Indonesia.</p> <p>c. Pada Pengeluaran Perkapita perempuan dan laki-laki memiliki kesimpulan hasil regresi</p>

				yang sama. Yaitu ketika Pengeluaran Perkapita perempuan berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI di Indonesia, begitu pula pada Pengeluaran Perkapita laki-laki yaitu Pengeluaran Perkapita laki-laki juga sama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI di Indonesia.
3	Dendi Saputra, dkk (2024)	Dampak Ketimpangan Gender terhadap <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Ketimpangan Gender, Tenaga Kerja Formal menurut Jenis Kelamin, Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Jenis Kelamin, dan Proporsi Perempuan yang berada di Posisi Managerial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih kerap terjadi di Indonesia hal ini didukung oleh indikator seperti ketimpangan jumlah pekerja formal laki-laki dan perempuan, kecilnya persentase perempuan yang menduduki posisi manager, serta ketimpangan tingkat penyelesaian pendidikan antar gender. Ketimpangan gender memiliki dampak signifikan terhadap SDGs, ketimpangan gender tidak hanya menjadi hambatan bagi kesetaraan gender (SDGs 5), tetapi juga berpengaruh terhadap tujuan-tujuan lainnya.
4	Febiola Napitupulu dan Marlina Ekawaty (2022)	Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-negara Asia Timur dan Pasifik	PDB, Ketimpangan Gender, Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender yang cukup serius di negara-negara Asia Timur dan Pasifik, di mana perempuan lebih dirugikan daripada laki-laki. Selain itu ditemukan bahwa ketimpangan gender berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pengurangan ketimpangan gender di bidang Ekonomi,

				Pendidikan, serta bidang Politik berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengurangan ketimpangan gender di bidang Kesehatan ditemukan ternyata justru dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi
5	Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman (2024)	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketimpangan Gender di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel	PDRB, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Bekerja, Ketimpangan Pendapatan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA, Angka Melek Huruf Perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Upah Perempuan, Jumlah Penduduk Menganggur, Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio	Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio Angka Melek Huruf Perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan
6	Monica Larasati, dkk (2023)	PEGEMI (Peran Generasi Milenial) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pendekatan Media Sosial	Generasi Milenial, Kesetaraan Gender, dan Media Sosial	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender dan mereka juga berpartisipasi aktif dalam gerakan kesetaraan gender.

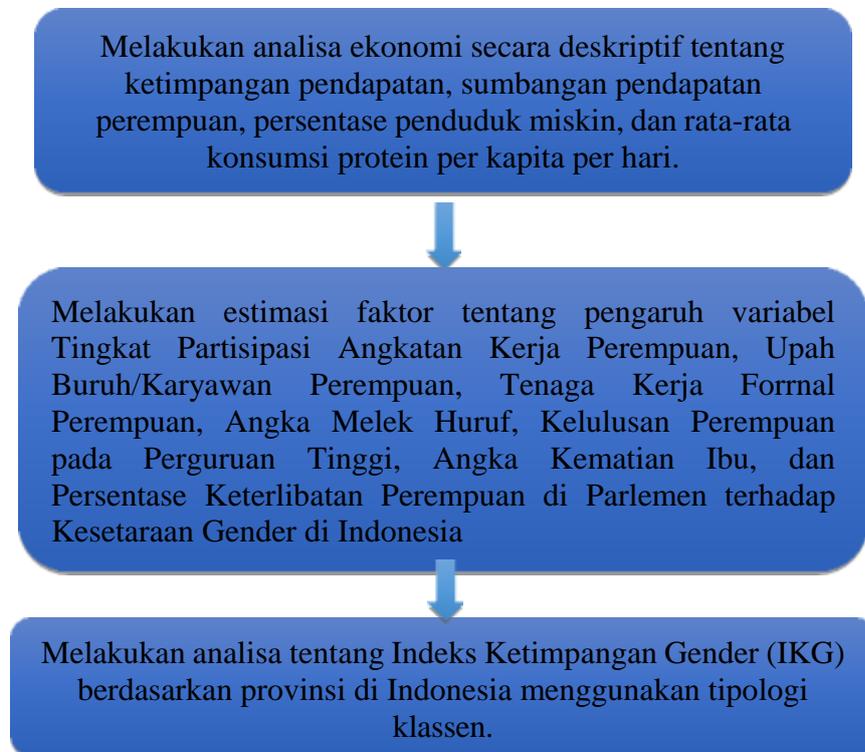
				<p>Generasi milenial juga telah mengambil inisiatif untuk membawa isu kesetaraan gender ke ranah publik melalui media sosial dan kegiatan-kegiatan sosial. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam memperjuangkan kesetaraan gender.</p>
7	Elsy Renie (2020)	Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif	Ekonomi Inklusif, Partisipasi Perempuan, dan Ekonomi	<p>Peranan perempuan dalam ekonomi inklusif, jika dilihat dalam dua indikator, yaitu sektor ketenagakerjaan dan sektor pendidikan, sudah menampakkan perkembangan, kondisi ini bisa terlihat dari partisipasi perempuan dalam tenaga kerja yang hampir menyamai posisi laki-laki, demikian juga kondisi perempuan dalam pendidikan, posisi perempuan masih berada di belakang laki-laki, dengan persentase perbedaan yang cukup kecil di belakang kaum laki-laki, karena pendidikan adalah hal yang cukup signifikan dan juga sebagai gerbang awal dalam mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih kompetitif dan layak bagi perempuan, yang merupakan pilar pembangunan ekonomi yang inklusif, namun perempuan bekerja belum menduduki sektor-sektor yang menguntungkan. Peran perempuan dalam ekonomi yang inklusif membutuhkan keberpihakan dan juga literasi dari pemerintah.</p>

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1. Tahap Penelitian

Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang ketimpangan pendapatan, sumbangan pendapatan perempuan, persentase penduduk miskin, dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari di Indonesia pada tahun 2014-2023. Beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia yaitu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Setelah dilakukan estimasi kemudian melihat kondisi kesetaraan gender di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2023

2.4.2. Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian

2.4.3. Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Analisa Faktor

Dalam model ini, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen, merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap kesetaraan gender yang dimana merupakan variabel terikat.

2.5. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif dan pengaruh signifikan dari TPAK Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, TK Formal Perempuan, AMH Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, AKI, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data dalam penelitian ini berjenis *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut runtun waktu pada suatu variabel tertentu.

3.2. Definisi Operasional

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Kesetaraan Gender	Kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan diukur dalam (%) per tahun	Variabel Terikat	www.weforum.org
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk perempuan yang berusia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja, diukur dalam (%) per tahun	Variabel Bebas	www.bps.go.id

Upah Buruh/ Karyawan Perempuan	Upah buruh/karyawan perempuan, dalam penelitian ini yang diambil adalah upah yang diterima oleh perempuan, diukur dalam (rupiah) per tahun	Variabel Bebas	satudata.kemnaker.go.id
Tenaga Kerja Formal Perempuan	Tenaga kerja perempuan yang bekerja pada perusahaan/lembaga resmi, yang diukur dalam (%) per tahun	Variabel Bebas	www.bps.go.id
Angka Melek Huruf Perempuan	Angka yang menunjukkan penduduk perempuan yang mampu membaca dan menulis huruf, diukur dalam (%) per tahun.	Variabel Bebas	www.bps.go.id
Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi	Perempuan yang menamatkan Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, diukur dalam (%) per tahun	Variabel Bebas	www.bps.go.id
Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian perempuan akibat proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas diukur dalam (jiwa) per tahun	Variabel Bebas	www.kemkes.go.id
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Proporsi atau persentase jumlah anggota parlemen perempuan dalam suatu lembaga legislatif tertentu, diukur dalam (%) per tahun	Variabel Bebas	www.weforum.org

Sumber: Olahan Penulis

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Secara khusus penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan melihat perkembangan kesetaraan gender. Data yang digunakan merupakan data yang telah disediakan dalam laporan lembaga terkait yang resmi.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yang dimulai dari bulan Maret hingga April 2025

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data *time series* yang dimulai dari tahun 2014-2023.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti *World Economic Forum*, Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *World Economic Forum*, Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kurun waktu 10 tahun (2014-2023).

3.6. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang memengaruhi kesetaraan gender di Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif pilar kedua di Indonesia dengan menggunakan data times series yaitu data tahunan yang dimulai dari periode 2014-2023, model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KG_t = \beta_0 + \beta_1 TPAKP_t + \beta_2 UB/K/PP_t + \beta_3 TKFP + \beta_4 AMH_t + \beta_5 KPPT_t + \beta_6 AKI_t + \beta_7 KPP_t + \epsilon_t$$

Dimana:

KG : Kesetaraan Gender
 TPAKP : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
 UB/PP : Upah Buruh/Karyawan Perempuan

TKFP	: Tenaga Kerja Formal Perempuan
AMH	: Angka Melek Huruf Perempuan
KPPT	: Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi
AKI	: Angka Kematian Ibu
KPP	: Keterlibatan Perempuan di Parlemen
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien
t	: Unit Waktu (2014-2023)
ϵ_t	: <i>term of error</i>

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data runtun waktu (*time series*) dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2014 sampai 2023). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*Multiple Regression Model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* adalah sebagai:

1. Nilai rata-rata *disturbance term* = 0
2. Tidak terdapat korelasi serial (*Serial Auto Correlation*) diantara *disturbance term* $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : t \neq j$
3. Sifat *homocedasticity* dari *disturbance term* $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antar ϵ^i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model

regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.

6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variable- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi *gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. (Gujarati, 2016).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang Ketimpangan Pendapatan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Persentase Penduduk Miskin, dan Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi inklusif khususnya pilar kedua di Indonesia.

3.8.2 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender

A. Tahapan Analisis

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antar variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted* R² (Kuncoro, 2013).

2. Pengujian (*Test Diagnostic*)**a. Uji Parsial (uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP),

Upah Buruh/Karyawan Perempuan (UB/PP t), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP t), Angka Melek Huruf Perempuan (AMH t), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT t), Angka Kematian Ibu (AKI t), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP t) terhadap Kesetaraan Gender (KG t). Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- a. Hipotesis $H_0 : \beta_1 - \beta_7 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia 2014-2023)
- b. Hipotesis $H_1 \neq \beta_1 - \beta_7 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia 2014-2023).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji t. Dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

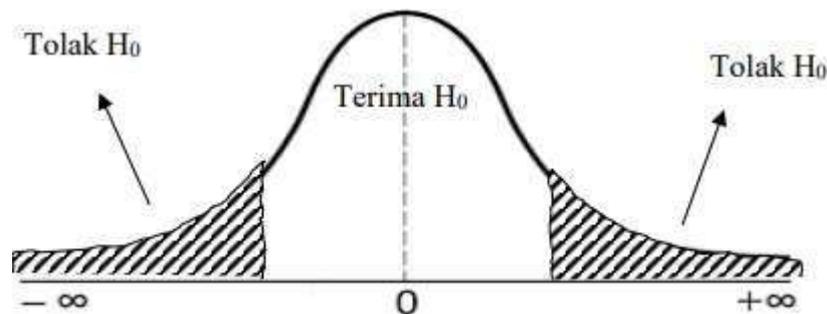
β_1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

β_2 : Upah Buruh/KaryawanPerempuan
 β_3 : Tenaga Kerja Formal Perempuan
 β_4 : Angka Melek Huruf Perempuan
 β_5 : Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi
 β_6 : Angka Kematian Ibu
 β_7 : Keterlibatan Perempuan di Parlemen
 Se β_i : *Standar error*

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t(\alpha/2, n - 1)$ dengan derajat kesalahan α pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

3. Kriteria Uji

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam



distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:

4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model TPAKPt, UB/K/PPt, TKFPt, AMHt, IKPt, AKIt, dan KPPt secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kesetaraan gender di Indonesia tahun 2018-2023.

Dimana langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

a. Hipotesis H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia 2014-2023).

- b. Hipotesis $H_1 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia 2014-2023).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

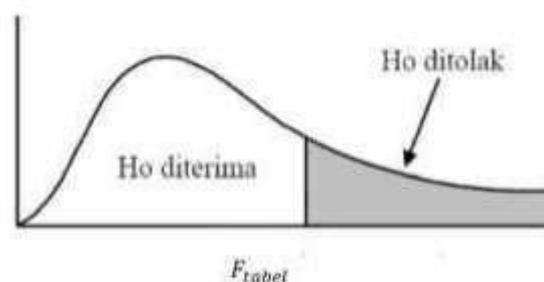
$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

K = jumlah parameter yang diesmati
n = Jumlah data yang di observasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n-k-1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

- 3. Kriteria Uji**Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



c. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS (*Ordinary Least Square*) mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS (*Ordinary Least Square*) yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinieritas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

1. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2016).

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak

efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 *regresi auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung x^2 , dimana $x^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3. Autokorelasi

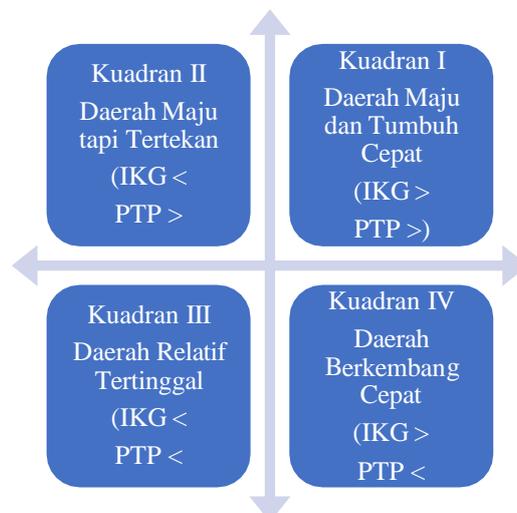
Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan

lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_i dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $2 < DW < 4 - d_u$ maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2016).

3.8.3 Analisis Tipologi Klassen Indeks Ketimpangan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional berdasarkan Provinsi di Indonesia

Penelitian ini menggunakan model analisis Tipologi Klassen. Model Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) masing-masing provinsi di Indonesia. Tipologi kelas pada penelitian membagi wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu Indeks Kesetaraan Gender (IKG) yang terletak di sumbu vertikal dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) terletak di sumbu horizontal.

Tabel 3.2 Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Daerah



Sumber: Buku Ekonomi Regional, diolah 2025

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Indonesia

4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan 95° – 141° Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

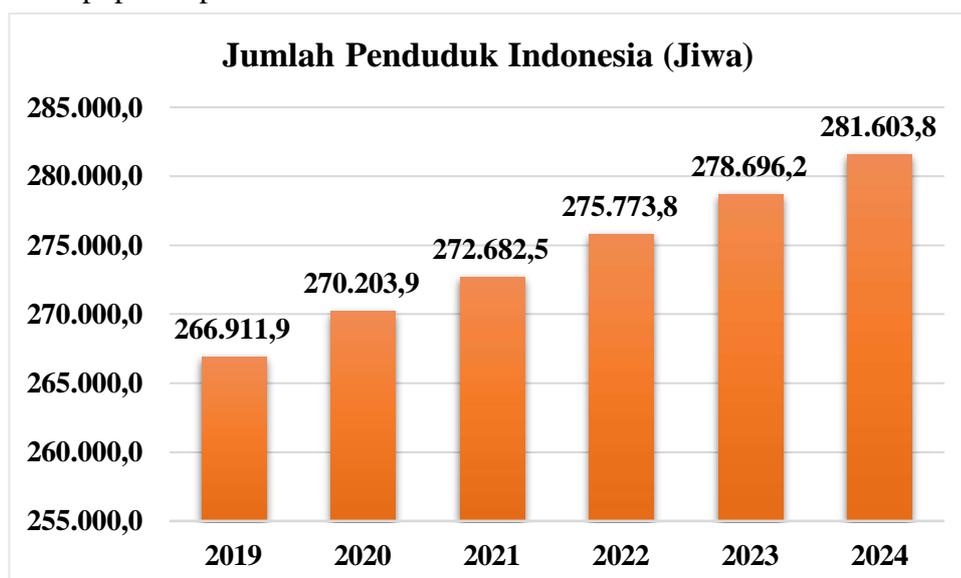
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia terdapat 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan sebesar 1.892.555,47 km² dengan total populasi pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan.

Luas lautan Indonesia sekitar 3.273.810 km² dan memiliki batas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil. Batas ujung barat Indonesia ialah Sabang; ujung timur adalah Merauke; ujung utara adalah Miangas; ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau serta berada di belahan timur bumi. Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB (Waktu Indonesia bagian Barat), WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah), dan WIT (Waktu Indonesia bagian Timur).

4.1.2 Kondisi Demografi Indonesia

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau 50,58% dari total penduduk Indonesia. Sementara, total penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta jiwa atau sebanyak 49,42 persen dari penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang terus meningkat sejak tahun 1971.

Rentang usia dibagi dalam 6 generasi, yaitu Post Generasi Z (lahir 2013 – sekarang) 10,88% dari total populasi penduduk di Indonesia, Generasi Z (lahir tahun 1997 – 2012) sebanyak 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,95% dari total seluruh populasi penduduk Indonesia, Generasi Milenial (lahir tahun 1981 – 1996) jumlah penduduk generasi millennial sebanyak 69,38 juta jiwa atau sebesar 25,87%, Generasi X (lahir 1965 - 1980) sebanyak 21,88%, Baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964) 11,56%, dan Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945) 1,87% dari total populasi penduduk di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia (2019-2024)

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 266,9 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang stabil pada periode ini mencerminkan tren kelahiran yang masih tinggi, meskipun ada upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui berbagai program keluarga berencana.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk meningkat menjadi 270,2 juta jiwa. Peningkatan ini menandai tambahan sekitar 3,3 juta jiwa dalam satu tahun. Tahun 2020 juga dikenal dengan awal merebaknya pandemi COVID-19, yang berdampak luas pada aspek kesehatan dan ekonomi. Namun, dampak pandemi terhadap jumlah penduduk tidak terlalu signifikan pada tahun ini, meskipun ada peningkatan mortalitas dan perubahan dalam dinamika sosial.

Tahun 2021 mencatat jumlah penduduk sebesar 272,7 juta jiwa, dengan pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 2,5 juta jiwa ini masih berada dalam tren pertumbuhan alami, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Program vaksinasi dan penanganan pandemi mulai menunjukkan dampak positif, yang memungkinkan kehidupan sosial dan ekonomi untuk berangsur pulih.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk terus meningkat menjadi 275,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini mencerminkan stabilitas demografis dan keberlanjutan populasi yang cukup konsisten. Pada periode ini, ekonomi mulai bangkit kembali dengan lebih kuat, didukung oleh pemulihan di berbagai sektor yang sebelumnya terdampak pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang tetap stabil, meskipun pada tingkat yang sedikit lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan penyediaan layanan publik, perumahan, dan lapangan kerja.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 281.603,80 ribu jiwa atau sekitar 281,6 juta jiwa. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kenaikan rata-rata sekitar 2,9 juta jiwa per tahun dari 2021 hingga 2024.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan penyediaan layanan publik, perumahan, dan lapangan kerja.

Tabel 4.1 Ketenagakerjaan Indonesia

Komponen	Tahun (Juta)			
	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	140,15	143,73	147,71	152,11
Bekerja (Jiwa)	131,05	135,3	139,85	144,64
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	9,10	8,42	7,86	7,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan definisi tersebut, pada periode 2021-2024 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56

juta orang atau sekitar 5,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan kegiatannya, angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2023 jumlah penduduk bekerja hampir mencapai 140 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen pada periode 2021-2024

Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021-2024. Begitupun dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama.

4.1.3 Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)

Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 5,07%. Hal ini menunjukkan optimisme di pasar domestik serta penguatan sektor-sektor ekonomi utama seperti manufaktur dan jasa. Meskipun begitu, pada tahun 2019, pertumbuhan sedikit menurun menjadi 5,02%, menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah pertumbuhan yang kuat pada tahun sebelumnya.

Indonesia telah mencatatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami deflasi atau penurunan signifikan di tahun 2020, selaras dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen mengalami penyusutan, dengan ekspor barang dan jasa berkontraksi paling besar yaitu 7,70%. Impor barang dan jasa, di sisi lain, yang menjadi faktor penekan, menyusut 14,71%.

Perekonomian Indonesia mulai pulih secara keseluruhan pada tahun 2021, dengan pertumbuhan mencapai 3,69%, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 2,07%. Pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Pada tahun 2023, menurun dibandingkan tahun 2022 di angka 5,03%, namun tetap menandakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pemulihan pasca-pandemi dan mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi di atas dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.

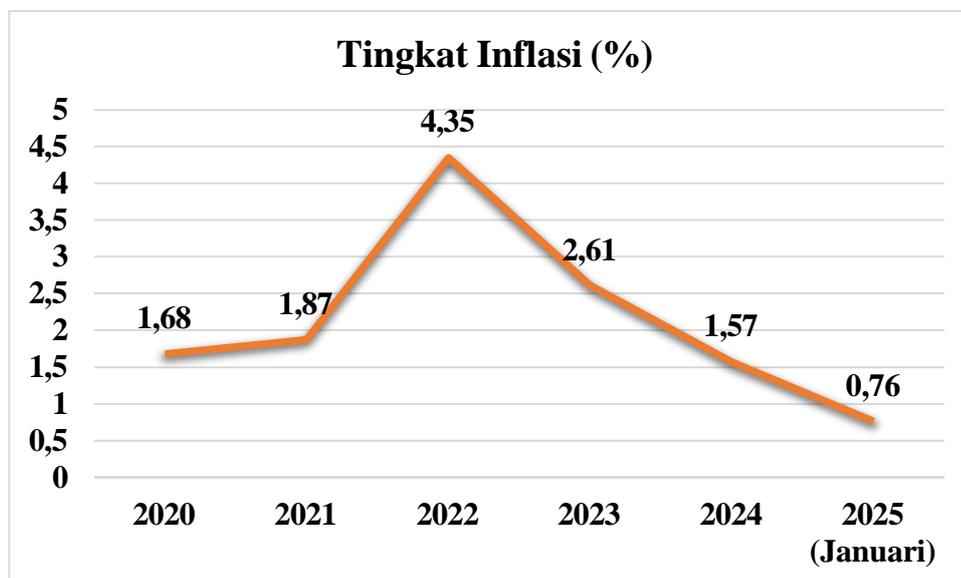


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)

2. Tingkat Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada



naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Sumber: Bank Indonesia, diolah 2025

Gambar 4.4 Tingkat Inflasi di Indonesia (2018-2024)

Tahun 2020 menandai titik terendah dalam tingkat inflasi pada periode ini, yaitu sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang mengurangi permintaan konsumen secara drastis. Pada tahun 2021, inflasi sedikit meningkat menjadi 1,87%, mencerminkan awal dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Inflasi pada tahun 2022 meningkat signifikan, didorong oleh kenaikan harga energi global, gangguan rantai pasokan, dan pemulihan permintaan domestik. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan makanan menjadi faktor utama peningkatan inflasi. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali terus menurun menjadi 2,61% dan 1,57%, menunjukkan stabilisasi harga seiring dengan normalisasi kondisi ekonomi.

Indonesia saat ini mencapai titik inflasi terendahnya sejak tahun 2000 yaitu 0,76%. Namun, dengan rendahnya tingkat inflasi tersebut hal ini harus diwaspadai dan berhati-hati. Inflasi rendah saat ini bukan sebagai petunjuk yang baik dan tidak juga mencerminkan efisiensi tetapi lemahnya permintaan domestik. Sebagai contoh 9 dari 10 pelaku usaha omsetnya mengalami penurunan atau sepi. Artinya inflasi pada Januari tidak serta merta baik. Kurangnya daya beli konsumen jika terus dibiarkan Indonesia bisa memasuki fase krisis multidimensi yang sangat kuat dan akhirnya menjalani kondisi yang dinamakan Stagnansi

3. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 & *Share* di Indonesia

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

**Tabel 4.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 & Share
di Indonesia**

Lapangan Usaha	Produk Domestik Bruto & <i>Share</i> ADHK 2010 (Miliar Rp)				
	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.354.399,10 (Share:12,36%)	1.378.398,90 (Share:12,85%)	1.404.190,90 (Share:12,62%)	1.435.853,20 (Share:12,26%)	1.454.586,90 (Share: 11,82%)
B Pertambangan dan Penggalian	806.206,20 (Share: 7,36%)	790.475,20 (Share:7,37%)	822.099,50 (Share:7,39%)	858.146,60 (Share:7,32%)	910.679,40 (Share: 7, 40%)
C Industri Pengolahan	2.276.667,80 (Share:20,79%)	2.209.920,30 (Share:20,60%)	2.284.821,70 (Share:20,54%)	2.396.603,00 (Share:20,46%)	2.507.799,80 (Share: 20, 38%)
D Pengadaan Listrik dan Gas	111.436,70 (Share:1,017%)	108.826,40 (Share:1,014%)	114.861,10 (Share:1,03%)	122.451,90 (Share:1,045%)	128.460,50 (Share: 1,044%)
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9.004,90 (Share:0,083%)	9.449,30 (Share:0,088%)	9.919,30 (Share:0,089%)	10.240,10 (Share:0,087%)	10.741,40 (Share: 0,087%)
F Konstruksi	1.108.425,00 (Share:10,12%)	1.072.334,80 (Share:10,00%)	1.102.517,70 (Share:9,91%)	1.124.725,20 (Share:9,60%)	1.179.989,30 (Share:9,59%)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.440.185,70 (Share:13,15%)	1.385.651,20 (Share:12,92%)	1.449.831,40 (Share:13,03%)	1.529.951,80 (Share:13,06%)	1.604.114,00 (Share: 13,04%)
H Transportasi dan Pergudangan	463.125,90 (Share: 4,22%)	393.418,90 (Share:3,66%)	406.169,30 (Share:3,65%)	486.873,80 (Share: 4,15%)	554.854,90 (Share: 4,51%)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	333.304,60 (Share: 3,04%)	299.122,40 (Share:2,78%)	310.737,60 (Share:2,79%)	347.854,60 (Share:2,97%)	382.674,50 (Share: 3,11%)
J Informasi dan Komunikasi	589.536,10 (Share: 5,38%)	652.062,90 (Share:6,08%)	696.506,10 (Share:6,26%)	750.319,00 (Share: 6,40%)	807.304,60 (Share: 6,56%)
K Jasa Keuangan dan Asuransi	443.093,10 (Share: 4,04%)	457.486,50 (Share: 4,26%)	464.637,70 (Share: 4,17%)	473.623,80 (Share: 4,04%)	496.236,80 (Share: 4,03%)
L Real Estat	316.901,10 (Share: 2,89%)	324.259,40 (Share: 3,02%)	333.282,90 (Share: 2,99%)	339.014,90 (Share: 2,89%)	343.864,80 (Share: 2,79%)
M,N Jasa Perusahaan	206.936,20 (Share: 1,88%)	195.671,10 (Share: 1,82%)	197.106,70 (Share: 1,77%)	214.399,00 (Share: 1,83%)	232.076,10 (Share: 1,88%)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	365.538,80 (Share: 3,33%)	365.446,00 (Share: 3,40%)	364.246,60 (Share: 3,27%)	373.404,00 (Share: 3,18%)	378.989,10 (Share: 3,08%)
P	341.349,90	350.272,80	350.660,00	352.673,50	358.952,10

Jasa Pendidikan	(Share: 3,11%)	(Share: 3,26%)	(Share: 3,15%)	(Share: 3,01%)	(Share: 2,91%)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.487,90 (Share: 1,16%)	142.227,30 (Share: 1,32%)	157.085,50 (Share: 1,41%)	161.397,80 (Share: 1,37%)	168.926,20 (Share: 1,37%)
R,S,T,U Jasa Lainnya	205.011,40 (Share: 1,87%)	196.608,90 (Share: 1,83%)	200.773,20 (Share: 1,80%)	219.778,40 (Share: 1,87%)	242.891,70 (Share: 1,97%)
PDB	10.949.155,40	10.722.999,30	11.120.059,70	11.710.247,90	12.301.393,60

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Berdasarkan data diatas dapat dibagi menjadi lima tertinggi dan lima terendah menurut lapangan usaha PDB Atas Dasar Harga Konstan.

Tiga Tertinggi PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan

Usaha:

1. Industri Pengolahan (C)

Terjadi penurunan nilai PDB dari 2.276.667,80 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 2.209.920,30 miliar Rp pada tahun 2020. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara global dan domestik. Nilai PDB meningkat kembali menjadi 2.284.821,70 miliar Rp pada tahun 2021, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun 2020 yang sulit.

Terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai PDB, dari 2.284.821,70 miliar Rp pada tahun 2021 menjadi 2.507.799,80 miliar Rp pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan terus pulih dan berkembang setelah pandemi.

Meskipun nilai PDB sektor industri pengolahan meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PDB menunjukkan tren penurunan yang sangat kecil, dari 20,79% pada tahun 2019 menjadi 20,38% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini tumbuh, pertumbuhan sektor lain mungkin lebih cepat, sehingga persentase kontribusinya sedikit menurun.

2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)

Terjadi penurunan nilai PDB dari 1.440.185,70 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 1.385.651,20 miliar Rp pada tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat.

Nilai PDB meningkat kembali menjadi 1.449.831,40 miliar Rp pada tahun 2021, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun 2020 yang sulit. Terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai PDB, dari 1.449.831,40 miliar Rp pada tahun 2021 menjadi 1.604.114,00 miliar Rp pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran terus pulih dan berkembang setelah pandemi.

Meskipun nilai PDB sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PDB relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi antara 12,92% hingga 13,15%. Pada tahun 2023, kontribusinya adalah 13,04%, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu penyumbang utama PDB.

3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A)

Terjadi peningkatan nilai PDB dari 1.354.399,10 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 1.378.398,90 miliar Rp pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif tahan terhadap dampak awal pandemi COVID-19. Nilai PDB meningkat lagi menjadi 1.404.190,90 miliar Rp pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun dalam kondisi pandemi.

Terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai PDB, dari 1.404.190,90 miliar Rp pada tahun 2021 menjadi 1.454.586,90 miliar Rp pada tahun 2023. Ini

menunjukkan bahwa sektor ini terus tumbuh, meskipun dengan laju yang lebih lambat.

Meskipun nilai PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PDB menunjukkan tren penurunan, dari 12,36% pada tahun 2019 menjadi 11,82% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini tumbuh, pertumbuhan sektor lain mungkin lebih cepat, sehingga persentase kontribusinya sedikit menurun.

Tiga Terendah PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha:

1. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Terjadi peningkatan nilai PDB dari 9.004,90 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 9.449,30 miliar Rp pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah, meskipun dalam skala yang kecil.

Nilai PDB meningkat lagi menjadi 9.919,30 miliar Rp pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai PDB, dari 9.919,30 miliar Rp pada tahun 2021 menjadi 10.741,40 miliar Rp pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor ini terus tumbuh, meskipun dengan laju yang lambat.

Meskipun nilai PDB sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PDB sangat kecil dan relatif stabil, berkisar antara 0,083% hingga 0,089%. Pada tahun 2023, kontribusinya adalah 0,087%

2. Pengadaan Listrik dan Gas

Terjadi penurunan nilai PDB dari 111.436,70 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 108.826,40 miliar Rp pada tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan permintaan energi.

Nilai PDB meningkat kembali menjadi 114.861,10 miliar Rp pada tahun 2021, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun 2020 yang sulit. Terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai PDB, dari 114.861,10 miliar Rp pada tahun 2021 menjadi 128.460,50 miliar Rp pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas terus pulih dan berkembang setelah pandemi.

Meskipun nilai PDB sektor pengadaan listrik dan gas meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PDB relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi antara 1,014% hingga 1,045%. Pada tahun 2023, kontribusinya adalah 1,044%, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap memiliki kontribusi yang konsisten terhadap PDB.

3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)

Terjadi peningkatan nilai PDB dari 127.487,90 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 168.926,20 miliar Rp pada tahun 2020. Dari 1,16% pada tahun 2019 menjadi 1,37% pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan share pada tahun 2020 dan 2021, share tersebut relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023.

Pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan permintaan akan layanan kesehatan, vaksinasi, dan program sosial menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Setelah tahun 2021,

pertumbuhan sektor kesehatan mulai melambat, namun tetap menunjukkan tren positif.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan telah memasuki fase normalisasi, dengan permintaan yang tetap tinggi namun tidak secepat selama pandemi.

4. Gini Rasio di Indonesia

Ketimpangan pendapatan/gini rasio merujuk pada perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yang dapat menyebabkan kesenjangan yang lebih besar antara berbagai kelompok dalam masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.5 Gini Rasio Indonesia (2019-2024)

Ketimpangan pendapatan pada tahun 2019 berada pada angka 0,380. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka 0,384. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi yang stabil sebelum pandemi COVID-19.

Tahun 2020 ketimpangan pendapatan meningkat menjadi 0,385. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan dampak awal pandemi COVID-19 yang

memperburuk ketimpangan pendapatan. Banyak sektor ekonomi terdampak, terutama sektor informal dan usaha kecil yang kehilangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan turun menjadi 0,381 pada tahun 2021, menunjukkan adanya pemulihan setelah lonjakan ketimpangan pada 2020. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan stimulus ekonomi, bantuan sosial, serta pemulihan aktivitas ekonomi setelah *lockdown* akibat COVID-19.

Tahun 2022 Gini ratio tetap di angka 0,381, menandakan tidak adanya perkembangan dari tahun sebelumnya atau *stagnan* dalam ketimpangan pendapatan. Pemulihan ekonomi masih berlangsung, tetapi belum cukup kuat untuk mengurangi ketimpangan lebih jauh.

Ketimpangan meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023, merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir ini. Terjadi akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, di mana kelompok berpenghasilan tinggi pulih lebih cepat dibanding kelompok berpenghasilan rendah. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan.

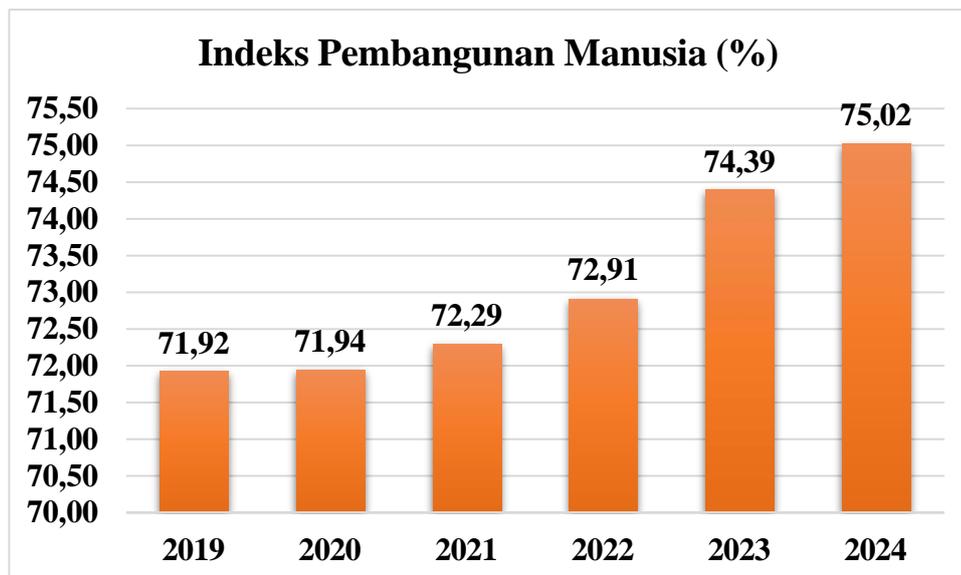
Gini ratio kembali turun ke 0,381 pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan atau stabilisasi dalam distribusi pendapatan. Dapat disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, peningkatan upah minimum, atau intervensi sosial pemerintah.

4.1.4 Perkembangan Sosial di Indonesia

Perkembangan sosial di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu: 1. $IPM < 50$ (rendah); 2. $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah); 3. $IPM \geq 80$ (tinggi)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.6 Indeks Pembangunan Manusia (2019-2024)

IPM tahun 2019 berada pada 71,92%. Ini menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang sedang, dengan ruang untuk perbaikan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM meningkat sedikit tahun 2020 menjadi 71,94%. Peningkatan ini sangat kecil, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan seperti pandemi COVID-19, upaya-upaya tertentu mungkin telah dilakukan untuk mempertahankan atau sedikit meningkatkan

kualitas hidup.

IPM meningkat menjadi 72,29% pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan dan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, meskipun masih dalam tingkat yang moderat. IPM meningkat lagi menjadi 72,91% pada tahun 2022. Tren peningkatan ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi.

IPM meningkat signifikan menjadi 74,39% tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam pembangunan manusia, mungkin karena kebijakan dan program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM 2024 mencapai 75,02%. Ini adalah peningkatan lanjutan yang menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangunan manusia terus berhasil, mendekati kategori "tinggi" dalam klasifikasi IPM.

2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan yang bersifat absolut dan relatif yang mengindikasikan bahwa individu atau kelompok orang di suatu daerah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat atau norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat karena faktor-faktor alamiah, kultural, atau struktural.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.7 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (2019-2024)

Persentase penduduk miskin tahun 2019 24,78% setara dengan 9,22 juta jiwa. Angka kemiskinan cukup tinggi dengan lebih dari 9 juta jiwa tergolong miskin. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 27,55%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan Jumlah penduduk miskin sebanyak 10,19 juta jiwa. Terjadi kenaikan signifikan dalam angka kemiskinan, baik dalam persentase maupun jumlah jiwa. Kemungkinan besar ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menghambat ekonomi, menyebabkan lebih banyak orang jatuh ke dalam kategori miskin.

Persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 26,5% turun dari 2020 dengan Jumlah penduduk miskin: 9,71 juta jiwa. Ada sedikit perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun angka kemiskinan masih tinggi, tetapi mulai menunjukkan penurunan, mungkin karena pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 26,36% dengan jumlah penduduk miskin: 9,57 juta jiwa. Tren penurunan terus berlanjut, meskipun masih tipis. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, meskipun belum terlalu signifikan.

Terus menurun sampai tahun 2023, dan tahun 2024 menjadi tahun dengan persentase dan jumlah penduduk miskin paling rendah selama periode tersebut. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia masih perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait untuk menguranginya.

3. Garis Kemiskinan di Indonesia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan mempertimbangkan program untuk menanggulangi kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.8 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024)

Garis kemiskinan pada tahun 2019 berada pada Rp 440.538,00 per kapita per bulan. Ini menunjukkan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada tahun tersebut. Garis kemiskinan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 458.947,00 per kapita per bulan. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh inflasi dan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi harga barang dan jasa serta pendapatan masyarakat.

Garis kemiskinan naik lagi pada tahun 2021 menjadi Rp 486.168,00 per kapita per bulan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat, mungkin karena faktor-faktor seperti pemulihan ekonomi yang belum stabil dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Garis kemiskinan pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi Rp 535.547,00 per kapita per bulan. Peningkatan yang cukup

besar ini dapat disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, pangan, dan komoditas lainnya, serta dampak dari kebijakan ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi.

Garis kemiskinan naik menjadi Rp 550.458,00 per kapita per bulan pada tahun 2023. Meskipun kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan inflasi masih mempengaruhi biaya hidup masyarakat. Garis kemiskinan mencapai Rp 595.242,00 per kapita per bulan pada tahun 2024. Ini adalah peningkatan yang cukup besar, menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat dan tantangan ekonomi masih ada.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia (2019-2024)

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2019 berada pada 1,50%. Ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang relatif rendah, yang berarti rata-rata pendapatan masyarakat miskin tidak terlalu jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat menjadi 1,75% pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan, mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan dan lapangan kerja.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2021 menurun sedikit menjadi 1,67%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengurangi kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 1,56%. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin mulai menunjukkan hasil.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 menurun menjadi 1,53%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi terus membaik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 1,36% pada tahun 2024. Ini adalah penurunan yang signifikan, menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin semakin efektif.

4.2 Perkembangan Indikator Pilar Kedua Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

4.2.1 Analisis Ekonomi tentang Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia

Ketimpangan antarwilayah merupakan fenomena yang umum dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam serta kondisi demografi yang bervariasi di setiap wilayah. Variasi ini berimplikasi pada kemampuan tiap daerah untuk mendorong proses pembangunan yang berbeda-beda (Todaro, 2014).

Tabel 4.3 Gini Rasio Provinsi di Indonesia

Provinsi	Gini Rasio % (0=Pemerataan Sempurna; 1=Ketimpangan Sempurna)				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,319	0,323	0,291	0,296	0,294
Sumatera Utara	0,314	0,313	0,326	0,309	0,306
Sumatera Barat	0,301	0,300	0,292	0,280	0,287
Riau	0,321	0,327	0,323	0,324	0,306
Jambi	0,316	0,315	0,335	0,343	0,315
Sumatera Selatan	0,338	0,340	0,330	0,338	0,331
Bengkulu	0,323	0,321	0,315	0,333	0,343
Lampung	0,320	0,314	0,313	0,324	0,301
Kep. Bangka Belitung	0,257	0,247	0,255	0,245	0,235
Kep. Riau	0,334	0,339	0,325	0,340	0,357
DKI Jakarta	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
Jawa Barat	0,398	0,406	0,412	0,425	0,428
Jawa Tengah	0,359	0,368	0,366	0,369	0,364
DI Yogyakarta	0,437	0,436	0,459	0,449	0,428
Jawa Timur	0,364	0,364	0,365	0,387	0,373
Banten	0,365	0,363	0,377	0,368	0,359
Bali	0,369	0,375	0,362	0,362	0,348
Nusa Tenggara Barat	0,386	0,384	0,374	0,375	0,364
Nusa Tenggara Timur	0,356	0,339	0,340	0,325	0,316
Kalimantan Barat	0,325	0,315	0,311	0,321	0,314
Kalimantan Tengah	0,320	0,320	0,309	0,317	0,304
Kalimantan Selatan	0,351	0,325	0,309	0,313	0,298
Kalimantan Timur	0,335	0,331	0,317	0,322	0,310
Kalimantan Utara	0,300	0,285	0,270	0,277	0,259
Sulawesi Utara	0,368	0,359	0,359	0,370	0,347
Sulawesi Tengah	0,321	0,326	0,305	0,304	0,309
Sulawesi Selatan	0,382	0,377	0,365	0,377	0,360
Sulawesi Tenggara	0,388	0,394	0,366	0,371	0,365
Gorontalo	0,406	0,409	0,423	0,417	0,413
Sulawesi Barat	0,356	0,366	0,371	0,351	0,330
Maluku	0,326	0,316	0,306	0,288	0,291
Maluku Utara	0,290	0,278	0,309	0,300	0,296
Papua Barat	0,376	0,374	0,384	0,370	0,385
Papua Barat Daya	-	-	-	-	0,347
Papua	0,395	0,396	0,393	0,386	0,405

Papua Selatan	-	-	-	-	0,424
Papua Tengah	-	-	-	-	0,355
Papua Pegunungan	-	-	-	-	0,346
Indonesia	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibagi menjadi tiga provinsi dengan gini rasio tertinggi dan tiga provinsi dengan gini rasio terendah dari tahun 2020-2024. Peringkat tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

Tiga Provinsi dengan Gini Rasio Tertinggi Tahun 2020-2024

1. DI Yogyakarta

DI Yogyakarta memiliki Gini Ratio yang tertinggi di antara semua provinsi pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2022, Gini Ratio mencapai 0.459, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 0.428, DI Yogyakarta tetap menjadi salah satu provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Tren menunjukkan bahwa DI Yogyakarta secara konsisten memiliki ketimpangan yang tinggi, meskipun ada fluktuasi kecil dari tahun ke tahun.

2. DKI Jakarta

DKI Jakarta memiliki Gini Ratio yang tinggi dan terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023 dan 2024, Gini Ratio mencapai 0.431, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. DKI Jakarta secara konsisten berada di antara 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi setiap tahunnya. Tren menunjukkan bahwa ketimpangan di DKI Jakarta cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

3. Gorontalo

Gorontalo memiliki Gini Ratio yang tinggi dan berada di antara 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada

tahun 2022, Gini Ratio mencapai 0.423, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 0.413, Gorontalo tetap menjadi provinsi dengan ketimpangan yang signifikan. Tren menunjukkan bahwa ketimpangan di Gorontalo cenderung stabil tinggi dengan fluktuasi kecil.

Tiga Provinsi dengan Gini Rasio Terendah Tahun 2020-2024

1. Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Gini Ratio yang terendah di antara semua provinsi setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, Gini Ratio mencapai 0.235, yang merupakan nilai terendah dalam lima tahun terakhir. Tren menunjukkan bahwa ketimpangan di Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun dari tahun ke tahun. Provinsi ini secara konsisten menunjukkan pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

2. Maluku Utara

Maluku Utara memiliki Gini Ratio yang rendah dan secara konsisten berada di antara 5 provinsi dengan ketimpangan terendah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Gini Ratio mencapai 0.278, yang merupakan nilai terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0.309, Gini Ratio kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0.296. Tren menunjukkan bahwa ketimpangan di Maluku Utara cenderung stabil rendah dengan sedikit fluktuasi.

3. Kalimantan Utara

Kalimantan Utara memiliki Gini Ratio yang rendah dan secara konsisten berada di antara 5 provinsi dengan ketimpangan terendah setiap tahunnya. Pada

tahun 2022, Gini Ratio mencapai 0.270, yang merupakan nilai terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0.277, Gini Ratio kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0.259. Tren menunjukkan bahwa ketimpangan di Kalimantan Utara cenderung menurun dari tahun ke tahun.

4.2.2 Analisis Ekonomi tentang Sumbangan Pendapatan Perempuan di Indonesia

Kontribusi pendapatan wanita merupakan dimensi lain dari distribusi pendapatan yaitu pendapatan bersih atau upah yang diterima wanita secara langsung setelah bekerja di sektor formal. yang diterima wanita secara langsung setelah bekerja di sektor formal. pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan mengenai jasa yang diberikan kepada faktor produksi dengan tingkat produktivitas yang baik sebagai faktor produksi dengan tingkat produktivitas yang baik sebagai imbalan atas faktor produksi yang disediakan oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Sumbangan pendapatan perempuan saat ini masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang salah satunya disebabkan karena relatif rendahnya kontribusi perempuan pada beberapa lapangan pekerjaan yang berproduktivitas tinggi (Bappenas, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Gambar 4.10 Sumbangan Pendapatan Perempuan Indonesia (2018-2023)

Sumbangan pendapatan perempuan berada di angka 36,70% pada tahun 2018, yang merupakan nilai terendah pada periode 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ekonomi masih relatif kecil dibandingkan laki-laki, dipengaruhi oleh keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal ataupun kesenjangan upah.

Terjadi peningkatan signifikan tahun 2019 menjadi 37,10%, naik 0,40% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, yang bisa disebabkan oleh peningkatan kesempatan kerja, kebijakan pro-perempuan, atau pertumbuhan sektor usaha yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja perempuan.

Sumbangan pendapatan perempuan mencapai puncaknya di 37,26% pada tahun 2020, angka tertinggi dalam grafik ini. Meski tahun ini merupakan awal pandemi COVID-19, perempuan tampaknya masih memiliki peran yang cukup kuat dalam ekonomi, mungkin karena banyak yang bekerja di sektor kesehatan, UMKM, dan industri berbasis digital. Selain itu, adaptasi ke pekerjaan berbasis daring (*work from home*) juga bisa membantu perempuan tetap produktif. Terjadi sedikit penurunan ke 37,22% pada tahun 2021, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya.

Tahun 2022 penurunan kembali terjadi menjadi 37,17%. Ini bisa mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi tidak merata dan lebih menguntungkan laki-laki dibanding perempuan. Faktor lain bisa berupa stagnasi dalam kebijakan inklusi ekonomi bagi perempuan.

Tahun 2023 Sumbangan pendapatan perempuan terus menurun ke 37,09%, kembali ke level yang lebih rendah daripada tahun 2019. Tekanan ekonomi pascapandemi seperti inflasi dan ketidakpastian pasar kerja mungkin lebih memengaruhi pekerjaan yang biasanya ditekuni perempuan, menjadi salah satu penyebab menurunnya sumbangan pendapatan perempuan di Indonesia.

4.2.3 Analisis Ekonomi tentang Persentase dan *Share* Penduduk Miskin di Indonesia.

Definisi kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Todaro (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. *Share* persentase penduduk miskin diukur untuk melihat provinsi di Indonesia yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi dan terendah terhadap persentase kemiskinan secara nasional.

Tabel 4.4 Persentase dan *Share* Penduduk Miskin di Indonesia

Provinsi	Persentase & <i>Share</i> Kemiskinan per Provinsi (%)				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	15,43 (<i>Share</i> 151,4%)	15,53 (<i>Share</i> 159,9%)	14,75 (<i>Share</i> 154,1%)	14,45 (<i>Share</i> 154,3%)	12,64 (<i>Share</i> 147,4%)
Sumatera Utara	9,14 (<i>Share</i> 89,69%)	8,49 (<i>Share</i> 87,4%)	8,33 (<i>Share</i> 87,04%)	8,15 (<i>Share</i> 87,07%)	7,19 (<i>Share</i> 83,89%)
Sumatera Barat	6,56 (<i>Share</i> 64,37%)	6,04 (<i>Share</i> 62,20%)	6,04 (<i>Share</i> 63,11%)	5,95 (<i>Share</i> 63,56%)	5,42 (<i>Share</i> 63,24%)
Riau	7,04 (<i>Share</i> 69,08%)	7,00 (<i>Share</i> 72,09%)	6,84 (<i>Share</i> 71,47%)	6,68 (<i>Share</i> 71,36%)	6,36 (<i>Share</i> 74,21%)
Jambi	7,97 (<i>Share</i> 78,21%)	7,67 (<i>Share</i> 78,99%)	7,70 (<i>Share</i> 80,45%)	7,58 (<i>Share</i> 80,98%)	7,26 (<i>Share</i> 84,71%)
Sumatera Selatan	12,98 (<i>Share</i> 127,3%)	12,79 (<i>Share</i> 131,7%)	11,95 (<i>Share</i> 124,8%)	11,78 (<i>Share</i> 125,8%)	10,51 (<i>Share</i> 122,6%)

Bengkulu	15,30 (Share 150,1%)	14,43 (Share 148,6%)	14,34 (Share 149,8%)	14,04 (Share 150%)	12,52 (Share 146,0%)
Lampung	12,76 (Share 125,2%)	11,67 (Share 120,1%)	11,44 (Share 119,5%)	11,11 (Share 118,6%)	10,62 (Share 123,9%)
Kep. Bangka Belitung	4,89 (Share 47,98%)	4,67 (Share 48,09%)	4,61 (Share 48,17%)	4,52 (Share 48,29%)	5,08 (Share 59,27%)
Kep. Riau	6,13 (Share 60,15%)	5,75 (Share 59,21%)	6,03 (Share 63,00%)	5,69 (Share 60,79%)	4,78 (Share 55,77%)
DKI Jakarta	4,69 (Share 46,02%)	4,67 (Share 48,09%)	4,61 (Share 48,17%)	4,44 (Share 47,43%)	4,14 (Share 48,30%)
Jawa Barat	8,43 (Share 82,72%)	7,97 (Share 82,08%)	7,98 (Share 83,38%)	7,62 (Share 81,41%)	7,08 (Share 82,61%)
Jawa Tengah	11,84 (Share 116,1%)	11,25 (Share 115,8%)	10,98 (Share 114,7%)	10,77 (Share 115,0%)	9,58 (Share 111,7%)
DI Yogyakarta	12,80 (Share 125,6%)	11,91 (Share 122,6%)	11,49 (Share 120,0%)	11,04 (Share 117,9%)	10,40 (Share 121,3%)
Jawa Timur	11,46 (Share 112,4%)	10,59 (Share 109,0%)	10,49 (Share 109,6%)	10,35 (Share 110,5%)	9,56 (Share 111,5%)
Banten	6,63 (Share 65,06%)	6,50 (Share 66,94%)	6,24 (Share 65,20%)	6,17 (Share 65,91%)	5,70 (Share 66,51%)
Bali	4,45 (Share 43,67%)	4,72 (Share 48,60%)	4,53 (Share 47,33%)	4,25 (Share 45,40%)	3,80 (Share 44,34%)
Nusa Tenggara Barat	14,23 (Share 139,6%)	13,83 (Share 142,4%)	13,82 (Share 144,4%)	13,85 (Share 147,9%)	11,91 (Share 138,9%)
Nusa Tenggara Timur	21,21 (Share 208,1%)	20,44 (Share 210,5%)	20,23 (Share 211,3%)	19,96 (Share 213,2%)	19,02 (Share 221,9%)
Kalimantan Barat	7,24 (Share 71,05%)	6,84 (Share 70,44%)	6,81 (Share 71,15%)	6,71 (Share 71,68%)	6,25 (Share 72,92%)
Kalimantan Tengah	5,26 (Share 139,6%)	5,16 (Share 53,14%)	5,22 (Share 54,54%)	5,11 (Share 54,59%)	5,26 (Share 61,37%)
Kalimantan Selatan	4,83 (Share 51,61%)	4,56 (Share 46,96%)	4,61 (Share 48,17%)	4,29 (Share 45,83%)	4,02 (Share 46,90%)
Kalimantan Timur	6,64 (Share 65,16%)	6,27 (Share 64,57%)	6,44 (Share 67,29%)	6,11 (Share 65,27%)	5,51 (Share 64,29%)
Kalimantan Utara	7,41 (Share 72,71%)	6,83 (Share 70,33%)	6,86 (Share 71,68%)	6,45 (Share 68,91%)	5,38 (Share 62,77%)
Sulawesi	7,78	7,36	7,34	7,38	6,70

Utara	(Share 76,34%)	(Share 75,79%)	(Share 76,69%)	(Share 78,84%)	(Share 78,17%)
Sulawesi Tengah	13,06 (Share 128,1%)	12,18 (Share 125,4%)	12,30 (Share 128,5%)	12,41 (Share 132,5%)	11,04 (Share 128,8%)
Sulawesi Selatan	8,99 (Share 88,22%)	8,53 (Share 87,84%)	8,66 (Share 90,49%)	8,70 (Share 92,94%)	7,77 (Share 90,66%)
Sulawesi Tenggara	11,69 (Share 114,7%)	11,74 (Share 120,9%)	11,27 (Share 117,7%)	11,43 (Share 122,1%)	10,63 (Share 124,0%)
Gorontalo	15,59 (Share 152,9%)	15,41 (Share 158,7%)	15,51 (Share 162,0%)	15,15 (Share 161,8%)	13,87 (Share 161,8%)
Sulawesi Barat	11,50 (Share 112,8%)	11,85 (Share 122,0%)	11,92 (Share 124,5%)	11,49 (Share 122,7%)	10,71 (Share 124,9%)
Maluku	17,99 (Share 176,5%)	16,30 (Share 167,8%)	16,23 (Share 169,5%)	16,42 (Share 175,4%)	15,78 (Share 184,1%)
Maluku Utara	6,97 (Share 68,40%)	6,38 (Share 65,70%)	6,37 (Share 66,56%)	6,46 (Share 69,01%)	6,03 (Share 70,36%)
Papua Barat	21,70 (Share 212,9%)	21,82 (Share 224,7%)	21,43 (Share 223,9%)	20,49 (Share 218,9%)	21,09 (Share 246,0%)
Papua Barat Daya	-	-	-	-	16,95 (Share 197,7%)
Papua	26,80 (Share 263,0%)	27,38 (Share 281,9%)	26,80 (Share 280,0%)	26,03 (Share 278,0%)	18,09 (Share 211,0%)
Papua Selatan	-	-	-	-	19,35 (Share 225,7%)
Papua Tengah	-	-	-	-	27,60 (Share 322,0%)
Papua Pegunungan	-	-	-	-	29,66 (Share 346,0%)
Indonesia	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibagi menjadi tiga provinsi dengan kemiskinan tertinggi dan tiga provinsi dengan kemiskina terendah dari tahun 2020-2024. Peringkat tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

Tiga Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi

1. Papua

Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara semua provinsi

yang dianalisis. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2024 (menjadi 18,09%), persentase kemiskinan di Papua tetap sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Share kemiskinan juga menunjukkan bahwa Papua memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemiskinan nasional.

2. Papua Barat

Papua Barat juga memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, meskipun sedikit lebih rendah daripada Papua. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 21,09%, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di provinsi ini masih menghadapi tantangan besar.

3. Nusa Tenggara Timur (NTT)

NTT memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, meskipun lebih rendah daripada Papua dan Papua Barat. Terjadi penurunan bertahap dari tahun 2020 hingga 2024, namun share kemiskinan tetap tinggi, menunjukkan bahwa NTT masih menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi kemiskinan terbesar di Indonesia.

Tiga Provinsi dengan Kemiskinan Terendah

1. Bali

Tingkat kemiskinan di Bali cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,80%. Ini menunjukkan bahwa Bali memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

2. DKI Jakarta

DKI Jakarta juga menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang

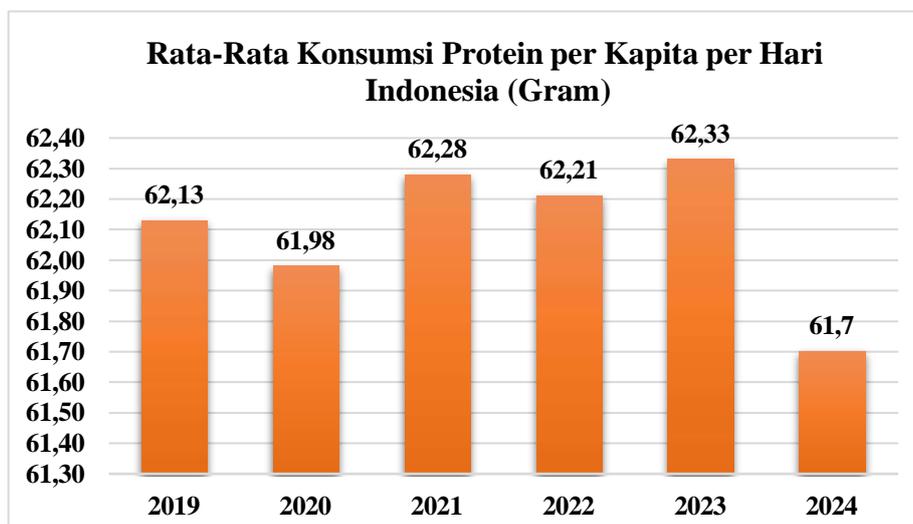
stabil. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Jakarta mencapai 4,14%, yang merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan infrastruktur, yang mungkin berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang rendah.

3. Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan juga termasuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Meskipun ada sedikit fluktuasi pada tahun 2022, secara keseluruhan tingkat kemiskinan di provinsi ini menurun, mencapai 4,02% pada tahun 2024.

4.2.4 Analisis Ekonomi tentang Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari

Tingkat kecukupan gizi merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kecukupan gizi dapat diukur berdasarkan jumlah kalori dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nilai kecukupan gizi yang direkomendasikan untuk masyarakat Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57gram protein. Standar ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang ke-11 pada tahun 2008.



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diolah 2025

Gambar 4.11 Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari (2019-2024)

Rata-rata konsumsi protein tahun 2019 menunjukkan angka 62,13 gram. Tahun 2019 menunjukkan konsumsi protein yang cukup stabil di atas 62 gram, menandakan ketersediaan dan aksesibilitas sumber protein yang relatif baik. Rata-rata konsumsi protein tahun 2020 sebanyak 61,98 gram turun dari 2019. Terjadi sedikit penurunan konsumsi protein. Kemungkinan penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada daya beli masyarakat dan ketersediaan pangan.

Rata-rata konsumsi protein tahun 2021 sebanyak 62,28 gram lebih tinggi dari 2020. Tahun ini menunjukkan peningkatan konsumsi protein. Ini bisa mencerminkan mulai membaiknya ekonomi dan ketersediaan pangan setelah dampak awal pandemi.

Rata-rata konsumsi protein tahun 2022 sebanyak 62,21 gram sedikit turun dari 2021. Penurunan yang sangat kecil dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa berarti konsumsi protein masyarakat tetap terjaga meskipun mungkin ada tantangan dalam sektor ekonomi atau harga pangan.

Rata-rata konsumsi protein sebanyak 62,33 gram naik dari 2022, tahun 2023 merupakan tertinggi dalam periode ini. Tahun 2023 menunjukkan angka konsumsi protein tertinggi dalam periode yang diamati. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat atau program pemerintah yang mendukung gizi dan pangan.

Rata-rata konsumsi protein tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan konsumsi sebanyak 61,7 gram. Penurunan ini cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kenaikan

harga bahan makanan tinggi protein, penurunan daya beli masyarakat, atau perubahan pola konsumsi.

4.3 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender

4.3.1 Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender

Statistik deskriptif adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Penyajian ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Model

	KG	TPAKP	UB_KP	TKFP	AMHP	KPPT	AKI	KPP
Mean	731244.5	712389.2	2268258.	707003.4	727869.6	733286.2	4782.200	239.9000
Median	730734.5	712305.5	2345508.	706974.0	727810.5	733298.5	4461.000	247.0000
Maximum	733108.0	713369.0	2641403.	707857.0	728321.0	733834.0	7389.000	280.0000
Minimum	730170.0	711212.0	1644458.	706077.0	727596.0	732727.0	4005.000	205.0000
Std. Deviasi	1149.466	673.2089	305833.5	588.4473	287.3988	451.3094	990.6112	29.48615

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk delapan variabel, yang diantaranya terdapat satu variabel terikat yaitu Kesetaraan Gender (KG). Terdapat juga tujuh variabel bebas yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

a. *Mean* (Rata-rata)

KG : Rata-rata kesetaraan gender adalah 731244.5%

TPAKP : Rata-rata TPAKP adalah 712389.2%

UB_KP : Rata-rata upah buruh karyawan perempuan adalah 2268258 juta

TKFP : Rata-rata tenaga kerja formal perempuan adalah 707003.4%

AMHP : Rata-rata angka melek huruf perempuan adalah 727869.6%

KPPT : Rata-rata kelulusan perempuan di perguruan tinggi adalah 73286.2%

AKI : Rata-rata angka kematian ibu adalah 4782.200 Jiwa

KPP : Rata-rata keterlibatan perempuan di parlemen adalah 239.9000%

b. *Median* (Nilai Tengah)

KG : *Median* kesetaraan gender adalah 730734.5%

TPAKP : *Median* TPAKP adalah 712305.5%

UB_KP : *Median* upah buruh karyawan perempuan adalah 2345508 juta

TKFP : *Median* tenaga kerja formal perempuan adalah 706974.0%

AMHP : *Median* angka melek huruf perempuan adalah 727810.5%

KPPT : *Median* kelulusan perempuan di perguruan tinggi adalah 733298.5%

AKI : *Median* angka kematian ibu adalah 4461.000 Jiwa

KPP : *Median* keterlibatan perempuan di parlemen adalah 247.0000%

c. *Maximum* (Maksimum)

KG : *Maximum* kesetaraan gender adalah 733108.0%

TPAKP : *Maximum* TPAKP adalah 713369.0%

UB_KP : *Maximum* upah buruh karyawan perempuan adalah 2641403 juta

TKFP : *Maximum* tenaga kerja formal perempuan adalah 707857.0%

AMHP : *Maximum* angka melek huruf perempuan adalah 728321.0%

KPPT : *Maximum* kelulusan perempuan di perguruan tinggi adalah
733834.0%

AKI : *Maximum* angka kematian ibu adalah 7389.000 Jiwa

KPP : *Maximum* keterlibatan perempuan di parlemen adalah 280.00000%

d. Minimum

KG : Minimum kesetaraan gender adalah 730170.0%

TPAKP : Minimum TPAKP adalah 711212.0%

UB_KP : Minimum upah buruh karyawan perempuan adalah 1644458 juta

TKFP : Minimum tenaga kerja formal perempuan adalah 706077.0%

AMHP : Minimum angka melek huruf perempuan adalah 727596.0%

KPPT : Minimum kelulusan perempuan di perguruan tinggi adalah
732727.0%

AKI : Minimum angka kematian ibu adalah 4005.000 Jiwa

KPP : Minimum keterlibatan perempuan di parlemen adalah 205.00000%

e. Standar Deviasi

KG : Standar Deviasi kesetaraan gender adalah 1149.466%

TPAKP : Standar Deviasi TPAKP adalah 673.2089% menunjukkan variasi
tingkat partisipasi angkatan kerja

UB_KP : Standar Deviasi upah buruh karyawan perempuan adalah 305833.5
juta menunjukkan tingkat variasi upah perempuan

TKFP : Standar Deviasi tenaga kerja formal perempuan adalah 588.4473%
menunjukkan tingkat variasi tenaga kerja formal perempuan

AMHP : Standar Deviasi angka melek huruf perempuan adalah 287.3988% menunjukkan tingkat variasi angka melek huruf perempuan

KPPT : Standar Deviasi kelulusan perempuan di perguruan tinggi adalah 451.3094% menunjukkan variasi kelulusan perempuan di perguruan tinggi

AKI : Standar Deviasi angka kematian ibu adalah 990.6112 Jiwa, menunjukkan variasi angka kematian ibu

KPP : Standar Deviasi keterlibatan perempuan di parlemen adalah 29.48615% menunjukkan tingkat variasi keterlibatan perempuan di parlemen

Kesimpulan:

Data ini memberikan gambaran statistik umum dari variabel-variabel yang diteliti. Secara umum, variabel-variabel ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan variabilitas yang terukur. Hasil ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti regresi, untuk melihat hubungan antara variabel-variabel ini.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: KG Method: Least Squares Date: 02/18/25 Time: 09:58 Sample: 2014 2023 Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1101112.	180027.3	-6.116362	0.0257
TPAKP	-0.417742	0.123449	-3.383930	0.0773
UB_KP	0.002018	0.000222	9.071778	0.0119
TKFP	0.138563	0.076497	1.811356	0.2118
AMHP	6.312792	0.349829	18.04536	0.0031
KPPT	-3.514929	0.279010	-12.59788	0.0062
AKI	0.882864	0.039281	22.47580	0.0020
KPP	23.95430	1.059506	22.60892	0.0020
R-squared	0.999049	Mean dependent var	731244.5	
Adjusted R-squared	0.995720	S.D. dependent var	1149.466	
S.E. of regression	75.20114	Akaike info criterion	11.46877	
Sum squared resid	11310.42	Schwarz criterion	11.71084	
Log likelihood	-49.34386	Hannan-Quinn criter.	11.20322	
F-statistic	300.1058	Durbin-Watson stat	2.797973	
Prob(F-statistic)	0.003325			

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah bahwa terdapat satu variabel bebas yaitu variabel Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kesetaraan Gender (KG). Dimana variabel Tenaga Kerja Formal Perempuan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai lebih besar daripada derajat kesalahan ($\alpha > 15\%$). Oleh karena itu, dilanjutkan uji regresi dengan menambahkan “Logaritma Natural”, sebagai berikut.

Tabel 4.7 Hasil Regresi Setelah Menambahkan Logaritma Natural

Dependent Variable: LOG(KG)				
Method: Least Squares				
Date: 02/24/25 Time: 20:05				
Sample: 2014 2023				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.81338	0.255550	42.31422	0.0006
TPAKP	-6.05E-07	1.75E-07	-3.461074	0.0743
UB_KP	2.80E-09	3.16E-10	8.874960	0.0125
TKFP	2.54E-07	1.08E-07	2.349308	0.1433
AMHP	8.46E-06	4.90E-07	17.28020	0.0033
KPPT	-4.49E-06	3.85E-07	-11.65498	0.0073
LOG(AKI)	0.006651	0.000306	21.72947	0.0021
KPP	3.43E-05	1.50E-06	22.91809	0.0019
R-squared	0.998982	Mean dependent var	13.50250	
Adjusted R-squared	0.995421	S.D. dependent var	0.001571	
S.E. of regression	0.000106	Akaike info criterion	-15.46988	
Sum squared resid	2.26E-08	Schwarz criterion	-15.22781	
Log likelihood	85.34938	Hannan-Quinn criter.	-15.73542	
F-statistic	280.5057	Durbin-Watson stat	2.864378	
Prob(F-statistic)	0.003557			

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil regresi kedua diatas, setelah menambahkan “Logaritma Natural”, ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Tenaga Kerja Formal Perempuan

(TKFP) yang sebelumnya tidak signifikan menjadi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kesetaraan Gender (KG) pada tingkat signifikansi 15% ($\alpha > 0.15$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai *R-squared* yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.998983, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

Variabel	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	
	Model sebelum Logaritma	Model setelah Logaritma
TPAKP	-0.417742** (-3.383930)	-6.05E-07** (-3.461074)
UB/KP	0.002018**** (9.071778)	2.80E-09*** (8.874960)
TKFP	0.138563 (1.811358)	2.54E-07* (2.349308)
AMHP	6.312792**** (18.04536)	8.46E-06**** (18.280020)
KPPT	-3.514929**** (-12.59788)	-4.49E-06**** (-11.65498)
AKI	0.882864**** (22.47580)	0.006651**** (21.72947)
KPP	23.95430**** (22.60892)	3.43E-05**** (22.91809)
Konstanta	-1101112	10.81338
<i>Number of Obs</i>	10	10
<i>Adj. R-Squared</i>	0.995720	0.995421
<i>R (Correlation)</i>	99.90	99.89
Uji F	300.1058 (0.003325)	280.5057 (0.003557)
<i>Durbin Watson</i>	2.797973	2.864378

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Keterangan: Level of Significant, **1%, ***5%, **10%, *15%; Coefficient, (T-Statistic)**

1. Penaksiran

a. Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.998982, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan

Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) terhadap Kesetaraan Gender (KG) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-Squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) dalam menjelaskan variabel terikat Kesetaraan Gender (KG). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai *R-Squared* sebesar 0.998982, artinya kontribusi sebesar 99,89%. Sedangkan sisanya sebesar 0,11% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

2. Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$\text{LOG(KG)}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{TPAKP} + \beta_2 \text{UB_KP} + \beta_3 \text{TKFP} + \beta_4 \text{AMHP} + \beta_5 \text{KPPT} + \beta_6 \text{LOG(AKI)} + \beta_7 \text{KPP} + \epsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG(KG)}_t = & 10.81338 + (-6.05\text{E-}07) \text{TPAKP}_t + (2.80\text{E-}09) \text{UB_KP}_t + \\ & (2.54\text{E-}07) \text{TKFP}_t + (8.46\text{E-}06) \text{AMHP}_t + (-4.49\text{E-}06) \text{KPPT}_t + (0.006651) \\ & \text{LOG(AKI)}_t + (3.43\text{E-}05) \text{KPP}_t + \epsilon_t \end{aligned}$$

Koefisien $\beta_0 = 10.81338$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh

Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) digunakan maka tingkat kesetaraan gender akan naik sebesar 10.81338% dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0006 ($\alpha < 5\%$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi tingkat Kesetaraan Gender akan bertambah sebesar 10.81338% jika menambahkan variabel bebas diatas.

Koefisien $\beta_1 = -6.05E-07$, artinya jika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) naik diperkirakan tingkat Kesetaraan Gender akan meningkat juga, namun pada pengolahan data mengatakan yang sebaliknya. Pada hasil regresi olahan data, kesetaraan gender justru menurun sebesar -6.05%. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa jika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan naik maka kesetaraan gender seharusnya meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh masih banyak perempuan yang menghadapi diskriminasi gender di tempat kerja, seperti upah yang lebih rendah, kesempatan promosi yang terbatas, atau lingkungan kerja yang tidak inklusif dan perempuan seringkali masih menanggung tanggung jawab domestik (seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga). Hal ini menciptakan beban ganda yang dapat mengurangi kesejahteraan dan kesempatan mereka untuk berkembang secara profesional. Jika dilihat dari hasil olahan diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0743 ($\alpha < 10\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yeni Nuraeni, dan Ivan Lilin Suryono (2021) juga menunjukkan bahwa TPAK Perempuan memiliki korelasi (hubungan) yang negatif terhadap kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena konsep laki-laki yang wajib mencari nafkah dan perempuan mengurus merupakan salah satu penyebab masih sangat rendahnya TPAK Perempuan Indonesia dibandingkan TPAK Laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan TPAK Perempuan memiliki korelasi yang negatif namun berpengaruh signifikan

Koefisien $\beta_2 = 2.80E-09$, artinya jika Upah Buruh/Karyawan Perempuan naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan naik sebesar 2.80%, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0125 ($\alpha = 1\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Upah Buruh/Karyawan Perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yeni Nuraeni, dan Ivan Lilin Suryono (2021) juga menunjukkan bahwa Upah Buruh/Karyawan Perempuan memiliki korelasi (hubungan) yang positif dan signifikan terhadap kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena kenaikan upah yang diterima oleh perempuan berpengaruh positif terhadap kesetaraan gender. Walaupun upah yang diterima perempuan lebih kecil laki-laki

Koefisien $\beta_3 = 2.54E-07$, artinya jika Tenaga Kerja Formal Perempuan naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan naik sebesar 2.54%, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.1433 ($\alpha = > 15\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa

Tenaga Kerja Formal Perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Samsul Arifin (2018) juga menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Formal Perempuan memiliki korelasi (hubungan) yang positif dan signifikan terhadap kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena persentase tenaga kerja formal perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki, jadi ketika tenaga kerja formal perempuan meningkat akan mempengaruhi kesetaraan gender juga.

Koefisien $\beta_4 = 8.46E-06$, artinya jika Angka Melek Huruf Perempuan naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan naik sebesar 8.46%, dan jika dilihat dari hasil olahan data di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0033 ($\alpha = 1\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Angka Melek Huruf Perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender.

Koefisien $\beta_5 = -4.49E-06$, artinya jika Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan meningkat, namun pada hasil pengolahan data mengatakan yang sebaliknya. Pada hasil regresi olahan data, kesetaraan gender justru menurun sebesar -4.49%. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa jika Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi naik maka kesetaraan gender seharusnya meningkat. Hal ini dapat terjadi karena meskipun lebih banyak perempuan lulus dari perguruan tinggi, mereka masih banyak menghadapi hambatan sistematis dalam memasuki pasar kerja, seperti bias gender, kesenjangan upah, atau kurangnya akses ke posisi strategis.

Jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0073 ($\alpha = 1\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesetaraan gender.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febiola Napitupulu, dan Marlina Ekawaty (2022) juga menunjukkan bahwa pendidikan (dalam penelitian ini Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi) memiliki korelasi yang negatif walaupun berpengaruh signifikan. Pada penelitian sebelumnya terjadi karena masih cukup banyak faktor sosial budaya masyarakat yang memunculkan stigma bahwa tidak penting bagi perempuan untuk meraih pendidikan tinggi karena perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga

Koefisien $\beta_6 = 0.006651$, artinya jika Angka Kematian Ibu naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan turun. Namun pada hasil pengolahan data mengatakan yang sebaliknya. Pada hasil regresi olahan data, kesetaraan gender justru meningkat sebesar 0.006%. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa jika Angka Kematian Ibu naik maka kesetaraan gender seharusnya menurun. Hal ini terjadi karena meskipun kesetaraan gender meningkat, akses ke layanan kesehatan berkualitas mungkin masih terbatas bagi perempuan, terutama di daerah terpencil atau kelompok minoritas. Jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0021 ($\alpha = 1\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Angka Kematian Ibu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender

Koefisien $\beta_7 = 4.43E-05$, artinya jika Keterlibatan Perempuan di

Parlemen naik diperkirakan tingkat kesetaraan gender akan naik sebesar 4.43%, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0019 ($\alpha = 1\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kesetaraan Gender.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febiola Napitupulu, dan Marlina Ekawaty (2022) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan politik (dalam penelitian ini Keterlibatan Perempuan di Parlemen) memiliki korelasi yang positif dan berpengaruh signifikan. Partisipasi perempuan dalam politik akan memfasilitasi demokrasi. Hal ini terjadi karena para politisi perempuan akan meningkatkan hak-hak sipil mereka dan membantu mengurangi ketimpangan gender yang terjadi.

3. Pengujian (*Test Diagnostic*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.81338	0.255550	42.31422	0.0006
TPAKP	-6.05E-07	1.75E-07	-3.461074	0.0743
UB_KP	2.80E-09	3.16E-10	8.874960	0.0125
TKFP	2.54E-07	1.08E-07	2.349308	0.1433
AMHP	8.46E-06	4.90E-07	17.28020	0.0033
KPPT	-4.49E-06	3.85E-07	-11.65498	0.0073
LOG(AKI)	0.006651	0.000306	21.72947	0.0021
KPP	3.43E-05	1.50E-06	22.91809	0.0019

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Rumus t_{hitung} sebagai berikut:

$$th = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

β_i : Koefisien regresi variabel

$Se \beta_i$: Standar eror dari masing-masing koefisien

Jika di masukkan nilai setiap koefisien ke dalam rumus tersebut maka menjadi sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP)

$$th = \frac{-6.05E-07}{1.75E-07} = -3.461074$$

- b. Upah Buruh/Karyawan Perempuan (UB_KP)

$$th = \frac{2.80E-09}{3.16E-10} = 8.874960$$

- c. Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP)

$$th = \frac{2.54E-07}{1.08E-07} = 2.349308$$

- d. Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP)

$$th = \frac{8.46E-06}{4.90E-07} = 17.28020$$

- e. Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi

$$th = \frac{-4.49E-06}{3.85E-07} = -11.65498$$

- f. Angka Kematian Ibu

$$th = \frac{0.006651}{0.000306} = 21.72947$$

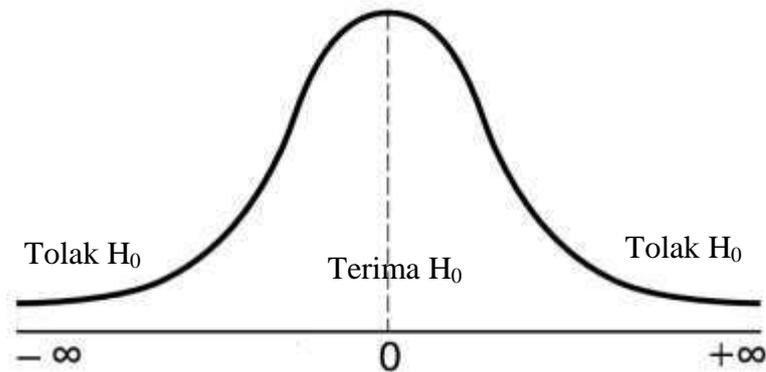
- g. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

$$th = \frac{3.43E-05}{1.50E-06} = 22.91809$$

Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara

mencari $df = (n-k) = 10 - 8 = 2$ dengan $(\alpha = 10\%/2=0.05)$ maka nilai tabel sebesar ± 2.91999 .

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



Kesimpulan

- a. t_{hitung} Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) -3.461074, berada di luar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji $-2.91999 > -3.461074 < 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_a artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap kesetaraan gender.
- b. t_{hitung} Upah Buruh/Karyawan Perempuan (UB_KP) 8.874960, berada di diluar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria uji $-2.91999 < 8.874960 > 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara upah buruh/karyawan perempuan terhadap kesetaraan gender.
- c. t_{hitung} Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP) 2.349308, berada didalam $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria ujia $-2.91999 < 2.349308 < 2.91999$ maka terima H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tenaga kerja formal perempuan terhadap kesetaraan gender. Namun, dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan nilai probabilitas 0.1433 ($\alpha = 15\%$)

- d. t_{hitung} Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP) 17.28020, berada diluar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria ujia $-2.91999 < 17.28020 > 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara angka melek huruf perempuan terhadap kesetaraan gender.
- e. t_{hitung} Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), -11.65498, berada diluar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria ujia $-2.91999 > -11.65498 < 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara kelulusan perempuan pada perguruan tinggi terhadap kesetaraan gender.
- f. t_{hitung} Angka Kematian Ibu (AKI) 21.72947, berada diluar $\pm t_{tabel}$ berada diluar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria ujia $-2.91999 < 21.72947 > 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara angka kematian ibu terhadap kesetaraan gender.
- g. t_{hitung} Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPPT) 22.91809, berada diluar $\pm t_{tabel}$ atau dalam kriteria ujia $-2.91999 < 22.91809 > 2.91999$ maka tolak H_0 atau terima H_1 artinya ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan perempuan di parlemen terhadap kesetaraan gender.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.998982	Mean dependent var	13.50250
Adjusted R-squared	0.995421	S.D. dependent var	0.001571
S.E. of regression	0.000106	Akaike info criterion	-15.46988
Sum squared resid	2.26E-08	Schwarz criterion	-15.22781
Log likelihood	85.34938	Hannan-Quinn criter.	-15.73542
F-statistic	280.5057	Durbin-Watson stat	2.864378
Prob(F-statistic)	0.003557		

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dimana rumus mencari F_{hitung} adalah: $F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

F_{hitung} adalah sebagai berikut:

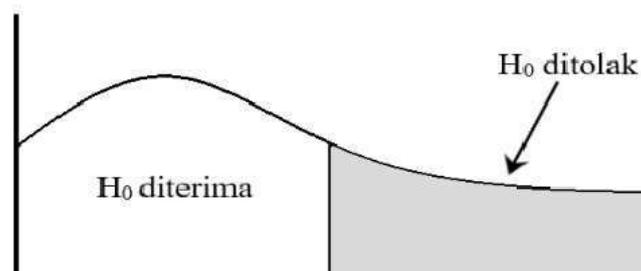
$$F = \frac{\frac{0.998982}{1-0.998982} - 1}{10-8} = 280.5057$$

Dari hasil regresi didapati variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) dalam menjelaskan variabel terikat Kesetaraan Gender (KG) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.003557.

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = (\alpha; df1 = k-1; df2 = n-k)$ maka $F_{tabel} = (10\%; df1=8-1; df2=10-8) = (0.1; 7; 2)$ dengan demikian nilai F_{tabel} adalah 99.356

Kriteria uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 , atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



Kesimpulan yaitu $280.5057 > 99.356$ berarti tolak H_0 atau terima H_1 , sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang secara serentak signifikan pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun, jika dilihat dari olahan *Eviews*, nilai probabilitasnya 0.003325 atau berada pada alpha 1% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan yang secara serentak antara variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), Upah Buruh Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi (KPPT), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) terhadap Kesenjangan Gender (KG).

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 02/22/25 Time: 18:29			
Sample: 2014 2023			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.50E+10	57784025	NA
TPAKP	0.016337	13707148	11.01677
UB_KP	5.33E-08	460.7943	7.417995
TKFP	0.006279	5189340.	3.235390
AMHP	0.128337	1.12E+08	15.77302
KPPT	0.079313	70508524	24.03730
LOGAKI	50145.06	5931.526	2.390454
KPP	1.200435	115.7752	1.552990

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Salah satu cara untuk melihat adanya atau tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan terbebas dari masalah multikolinearitas jika $VIF < 10$. Dari hasil

uji diatas menunjukkan nilai *Centered* VIF variabel Upah Buruh/Karyawan Perempuan (UB_KP), Tenaga Kerja Formal Perempuan (TKFP), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) berada dibawah 10 yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Namun, terdapat tiga variabel yang terjadi masalah multikolinearitas yaitu variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Harapan Hidup Perempuan dan Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi dengan angka diatas 10. Maka dilakukan perbaikan multikolinearitas pada kedua variabel tersebut dengan melakukan transformasi variabel $RGDP = TPAKP/KPPT/AMHP$. Selanjutnya, akan digunakan variabel hasil transformasi yakni RGDP untuk menggantikan kedua variabel yang terdeteksi multikolinearitas. Perbaikan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12 Perbaikan Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 02/22/25 Time: 18:26			
Sample: 2014 2023			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.42E+11	5119138.	NA
RGDP	2.75E+23	11638415	5.907416
UB_KP	1.89E-06	208.8893	3.362758
TKFP	0.456114	4830090.	3.011409
LOGAKI	1909081.	2893.674	1.166175
KPP	89.89681	111.0985	1.490258

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.13 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	15.69990	Prob. F(7,2)	0.0612
Obs*R-squared	9.821268	Prob. Chi-Square(7)	0.1989
Scaled explained SS	0.609453	Prob. Chi-Square(7)	0.9989

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *p value* yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (7) pada *OBS*R-Squared* yaitu sebesar 0.9989. Oleh karena itu *p value* $0.1989 > 0.05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.14 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag			
F-statistic	46.19790	Prob. F(1,1)	0.0930
Obs*R-squared	9.788126	Prob. Chi-Square(1)	0.0018

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

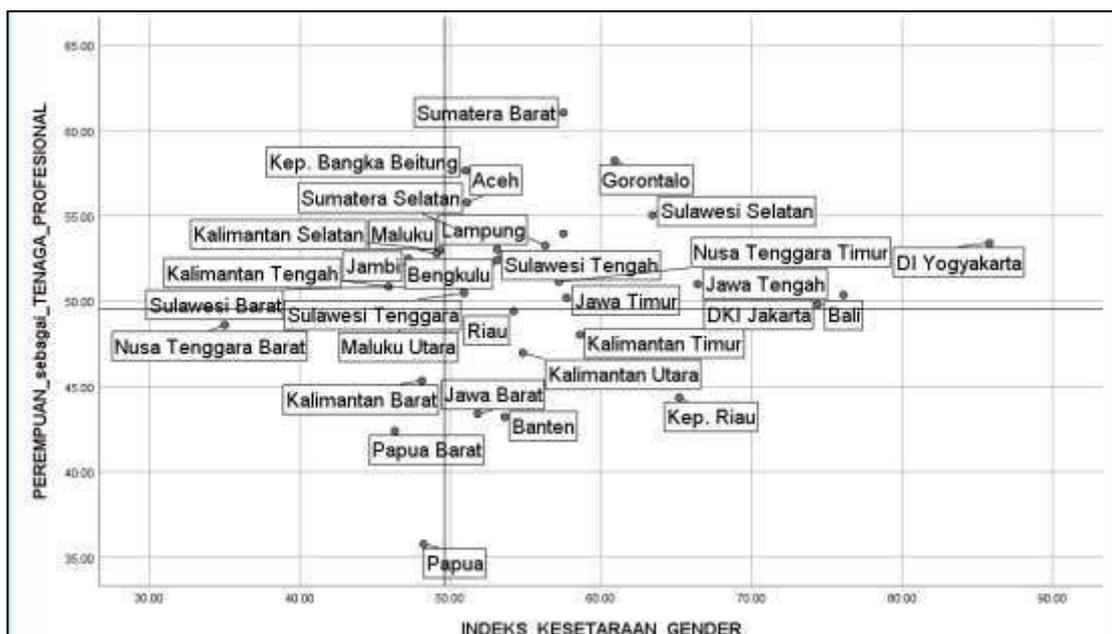
Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai *p value* yang ditunjukkan oleh nilai Prob. Chi Square (1) pada *Obs*R-squared* yaitu sebesar 0.0018. Nilai tersebut menunjukkan terjadinya masalah autokorelasi dikarenakan $0.0019 < 0.05$, yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahannya. Seharusnya nilai *p value* harus lebih besar daripada derajat kesalahan 0.05. Maka dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode Cochrane Orcutt Iterative Method yaitu dengan menambahkan series RESID. Perbaikan dari uji autokorelasi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah. Dapat dilihat bahwa nilai *p value* yang sebelumnya lebih kecil dari 0.05, setelah dilakukannya perbaikan *p value* menjadi lebih besar daripada 0.05 ($0.0995 > 0.05$). Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson sebesar 2.403501, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi

Tabel 4.15 Perbaikan Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.631257	Prob. F(2,5)	0.1657
Obs*R-squared	4.615110	Prob. Chi-Square(2)	0.0995

4.4 Analisis Tipologi Klassen Indeks Kesetaraan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional berdasarkan Provinsi di Indonesia

Tipologi klassen dalam penelitian digunakan untuk menganalisis indeks kesetaraan gender dan perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat pemetaan indeks ketimpangan gender dan perempuan sebagai tenaga profesional seluruh provinsi di Indonesia. Ditentukan oleh total indeks kesetaraan gender per provinsi yang terletak pada sumbu tegak (vertikal) dan perempuan sebagai tenaga profesional per provinsi yang terletak pada sumbu mendatar (horizontal). Daerah per provinsi dibagi menjadi empat golongan yaitu, provinsi yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I), provinsi maju tapi tertekan (kuadran II), provinsi relatif tertinggal (kuadran III), dan provinsi berkembang cepat (kuadran IV). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan provinsi yang terdapat di Indonesia dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran. Penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung Indeks Kesetaraan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional per provinsi di Indonesia pada tahun 2023



Sumber: IBM SPSS STATISTICS 26, diolah 2025

Gambar 4.12 Tipologi Klassen Indeks Kesetaraan Gender dengan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar 4.12 diatas Indonesia terdiri dari 38 provinsi dibagi dalam empat kuadran berdasarkan Indeks Kesetaraan Gender dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional. Hasil per provinsi pada tahun 2023 diperoleh sebagai berikut

Tabel 4.16 Tipologi Klassen Berdasarkan Indeks Kesetaraan Gender dengan Perempuan sebagai Tenaga Profesional per Provinsi Tahun 2023

Indeks Kesetaraan Gender (y) Perempuan sebagai Tenaga Profesional (r)	(yi < y)	(yi > y)
(ri > r)	<p>KUADRAN II</p> <p>Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Maluku</p>	<p>KUADRAN I</p> <p>Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat</p>
(ri < r)	<p>KUADRAN III</p> <p>Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Maluku Utara Papua Barat Papua</p>	<p>KUADRAN IV</p> <p>Riau Kep. Riau Jawa Barat Banten Kalimantan Timur Kalimantan Utara</p>

Sumber: IBM SPSS STATISTICS 26, diolah 2025

Kuadran I dalam tipologi klassen menunjukkan provinsi-provinsi dengan

tingkat Indeks Kesetaraan Gender diatas rata-rata nasional ($y_i > y$) dan juga memiliki tingkat Perempuan sebagai Tenaga Profesional di atas rata-rata nasional ($r_i > r$). Artinya, semua provinsi yang terletak di kuadran I memiliki kondisi yang relatif baik dalam hal kesetaraan gender dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di provinsi-provinsi ini memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan provinsi-provinsi di kuadran lainnya. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Kuadran II dalam tipologi kelas menunjukkan provinsi-provinsi dengan tingkat Indeks Kesetaraan Gender di bawah rata-rata nasional ($y_i < y$) namun memiliki tingkat Perempuan sebagai Tenaga Profesional diatas rata-rata nasional ($r_i > r$). Artinya, provinsi-provinsi pada kuadran II memiliki kondisi yang maju tapi tertekan. Provinsi-provinsi di kuadran II dapat diinterpretasikan sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam hal kesetaraan gender dan perempuan sebagai tenaga profesional. Meskipun indeks kesetaraan gender masih di bawah rata-rata nasional, tingginya perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan adanya peluang dan dukungan bagi perempuan.

Kuadran III dalam tipologi kelas menunjukkan provinsi-provinsi dengan tingkat Indeks Kesetaraan Gender di bawah rata-rata nasional ($y_i < y$) dan juga memiliki tingkat Perempuan sebagai Tenaga Profesional di bawah rata-rata nasional ($r_i < r$). Artinya, provinsi-provinsi di Kuadran III memiliki kondisi yang relatif tertinggal dalam hal kesetaraan gender dan perempuan sebagai tenaga profesional. Provinsi-provinsi pada kuadran III membutuhkan perhatian khusus

dalam hal ini. Rendahnya kesetaraan gender dan perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan adanya hambatan-hambatan struktural dan kultural yang serius dan harus diatasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang positif bagi perempuan di provinsi-provinsi ini.

Kuadran IV dalam tipologi klassen menunjukkan provinsi-provinsi dengan tingkat Indeks Kesetaraan Gender di atas rata-rata nasional ($y_i > y$) tetapi memiliki tingkat Perempuan sebagai Tenaga Profesional dibawah rata-rata nasional ($r_i < r$). Artinya, provinsi-provinsi di kuadran IV tergolong berkembang cepat, yaitu meskipun kesetaraan gender secara umum cukup baik, namun perempuan sebagai tenaga profesional masih perlu ditingkatkan. Tingginya kesetaraan gender menunjukkan adanya lingkungan yang kondusif bagi perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil analisis deskriptif secara ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi inklusif khususnya pada pilar kedua di Indonesia. Gini rasio per provinsi (2020-2024). Tiga provinsi dengan gini rasio tertinggi ditempati oleh DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Tiga provinsi dengan gini rasio terendah ditempati oleh Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Perkembangan sumbangan pendapatan perempuan (2018-2023) di Indonesia mengalami peningkatan dari 36,70% pada tahun 2018 menjadi 37,09% pada tahun 2023. Namun, peningkatan tersebut ternyata hanya meningkat 1% padahal dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu selama enam tahun. Persentase dan *share* penduduk kemiskinan per provinsi di Indonesia (2020-2024). Tiga provinsi dengan kemiskinan tertinggi pada tahun 2020-2024 di Indonesia ditempati oleh provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tiga provinsi dengan kemiskinan terendah pada tahun 2020-2024 di Indonesia ditempati oleh provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Perkembangan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari (2019-2024) menunjukkan tren yang naik turun. Capaian tertinggi diraih pada tahun 2023 yaitu 62,33 gram. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu 61,70 gram.

2. Hasil regresi menggunakan model ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender hasilnya signifikan sesuai hipotesis penelitian dimana variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Upah Buruh/Karyawan Perempuan, Tenaga Kerja Formal Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan, Kelulusan Perempuan pada Perguruan Tinggi, Angka Kematian Ibu, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesetaraan Gender secara simultan.
3. Melihat pemetaan Indeks Kesetaraan Gender dengan Perempuan sebagai Tenaga Profesional pada tahun 2023 menggunakan analisis tipologi kelas-kelas yaitu pada kuadran I didominasi oleh provinsi yang berasal dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Pada kuadran I tidak ada satupun provinsi dari Pulau Papua dan Pulau Kalimantan yang masuk pada kuadran ini. Namun, kebanyakan provinsi-provinsi di Indonesia masuk pada kuadran I yaitu sebanyak 19 provinsi. Kuadran II hanya empat provinsi di Indonesia yang masuk pada kuadran ini yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Kuadran III, yaitu provinsi yang relatif tertinggal dimana provinsi yang masuk pada kuadran III rata-rata ini berasal dari bagian timur Indonesia. Kuadran IV, yaitu provinsi yang berkembang dengan cepat, dimana provinsi yang masuk pada kuadran ini adalah Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyusun dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, memperluas program jaminan sosial untuk perempuan, terutama perempuan di sektor domestik, meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor-sektor yang masih didominasi oleh laki-laki, dan memperkuat kebijakan tentang kesetaraan gender yang sudah ada.
2. Diharapkan kepada perusahaan negara maupun perusahaan swasta untuk mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender yang adil dan transparan, termasuk kebijakan dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir yang tidak diskriminatif
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator kesetaraan gender yang lebih komprehensif dan terbaru, mengembangkan strategi intervensi untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia, dan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151–162. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>
- Admin. (2024). UN Women: *Butuh 236 tahun untuk wujudkan kesetaraan gender di dunia*. Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/video/4009533/un-women-butuh-236-tahun-untuk-wujudkan-kesetaraan-gender-di-dunia-bagian-1>
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27–41.
- Darwin, M. (2013). *Dari MDGs ke SDGs*. Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. <https://cpps.ugm.ac.id/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin/>
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. (2023). *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html>
- ERINA, R. (2024). *Alami Kemunduran, Kesetaraan Gender Sulit Tercapai hingga Abad 22*. Kantor Berita Ekonomi Dan Politik Republik Merdeka. <https://rmol.id/dunia/read/2024/09/05/635738/alami-kemunduran-kesetaraan-gender-sulit-tercapai-hingga-abad-2>
- Gujarati, D. N. (2003). *Ekonometri Dasar* (4th ed.). Erlangga.
- Gujarati, D. N. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Johnson, O. B. dan D. R. (2013). *Makroekonomi*. Erlangga.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Kali Pal, Kim Piaget, Saadia Zahidia, dan S. B. (2024). *Global Gender Gap Report 2024*. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>
- Larasati, M., Rozan, H., Saputra, I. D., H, A. F. B., Munir, A., & Radianto, D. O. (2023). PEGEMI (Peran Generasi Milenial) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Media Sosial. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 536–549. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.587>
- Mankiw, G. N. (2006). *Makroekonomi*. Erlangga.
- Napitupulu, F., & Ekawaty, M. (2022). Ketimpangan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Pada Negara-Negara Asia Timur Dan Pasifik. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.4>
- Prasetyantono, A. T. (1995). *Agenda Ekonomi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmatillah, S. (2024a). *WEF: Kesetaraan Gender Indonesia 2024 Naik 4,88% dalam 19 Tahun*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/wef-kesetaraan-gender-indonesia-2024-naik-488-dalam-19-tahun-VsMqy>
- Renie, E. (2020). Women's Participation in an Inclusive Economy. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 10.
- Rofatunnisa, S., & Usman, H. (2024). Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 15–32.

- <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2530>
- Ruggeri, A. (2023). *Empat negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg60v51yr2wo>
- Salsabilla, R. (2024). *Daftar 20 Negara Teraman untuk Perempuan, RI Nomor Berapa?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240325100159-33-525060/daftar-20-negara-teraman-untuk-perempuan-ri-nomor-berapa?>
- Saputra, D., Bangkito, R., Lestari, D. P., Hukum, P., Bengkulu, U., Gender, K., & Development, S. (2024). *DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)*. 7(4).
- Sjafrizal, P. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Smith, M. P. T. dan S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Jakarta.
- Smith, M. P. T. dan S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. Raja Grafindo Perseda.
- Utami, L. (2024). *Indonesia perlu terapkan ekonomi peka gender demi maksimalkan pertumbuhan dan kurangi kesenjangan*. The Conversation. <https://theconversation.com/indonesia-perlu-terapkan-ekonomi-peka-gender-demi-maksimalkan-pertumbuhan-dan-kurangi-kesenjangan-22517>

LAMPIRAN

A. Data Mentah Regresi Linier Berganda (Diolah)

Tahun	KG	TPAKP	UB/KP	TKFP	AMHP	KPPT	AKI	KPP
2014	67.2	50.22	1.644.458	36.16	93.45	7.52	5.019	250
2015	68.1	48.87	1.863.179	37.78	93.34	7.92	4.999	210
2016	68.2	50.77	2.192.723	38.16	93.59	7.92	4.912	207
2017	69.1	50.89	2.302.819	38.63	93.76	8.27	4.295	247
2018	69.1	51.88	2.398.674	38.10	93.99	8.99	4.226	247
2019	52.0	51.81	2.337.200	39.19	94.33	9.52	4.221	205
2020	70.0	53.13	2.354.599	34.65	94.55	9.88	4.627	211
2021	68.8	53.34	2.353.815	36.20	94.65	10.06	7.389	266
2022	69.7	53.41	2.593.709	35.57	95.26	10.61	4.005	280
2023	69.7	54.52	2.641.403	35.75	95.29	10.63	4.129	276

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Alyssia Putri Manurung
N.P.M : 2105180006
T.T.L : Tanjung Morawa, 06 November 2022
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

2. Data Pendidikan Formal

Tahun 2009-2015 : Sekolah Dasar Muhammadiyah
Tahun 2015-2018 : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Amaliyah
Tahun 2018-2021 : SMK Negeri 1 Medan
Tahun 2021-2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara